

**PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (PKB) SETELAH ERA REFORMASI 1998-2009**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

LISNA ALVIA

N I M : 1111045200007

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

**PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (PKB) SETELAH ERA REFORMASI 1998-2009**

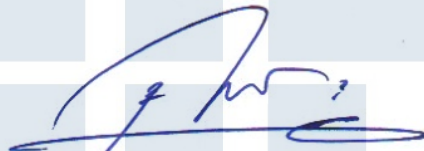
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Oleh :

Lisna Alvia

NIM. 1111045200007

Di Bawah Bimbingan



Dr. Rumadi, M.Ag

NIP: 196903041997031012

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

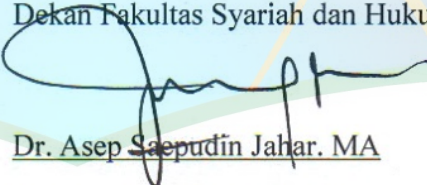
PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang berjudul PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) SETELAH ERA REFORMASI 1998-2009. Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Kamis 04 Juni 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Siyasa Syar'iyah (Hukum Ketatanegaraan Islam).

Jakarta, 04 Juni 2015

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Asep Saepudin Jahar. MA

NIP: 196912161996031001

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH

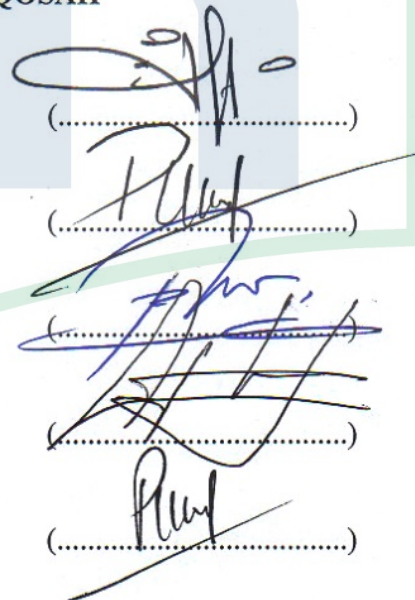
Ketua : Dra. Maskufa. M.Ag.
NIP:196807031994032002

Sekretaris : Rosdiana. M.A
NIP:196906102003122001

Pembimbing I : Dr. Rumadi, M.A
NIP:196903041997031012

Penguji I : Dr. Khamami Zada. MA
NIP: 197501022003121001

Penguji II : Rosdiana. M.A
NIP: 196906102003122001


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Lisna Alvia, 1111045200007. *Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009*. Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014.

Masalah pokok pada penelitian ini adalah pengaruh Gus Dur mengenai penguatan ideologi pancasila, menata hubungan agama dan politik serta orientasi dan praktek politik pada PKB, dari awal didirikan PKB sampai Gus Dur wafat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran, kekuatan dan pengaruh Gus Dur dalam partai politik PKB dari tahun 1998 hingga 2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analitis deskriptif yaitu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya, dengan menelaah buku-buku baik primer maupun sekunder. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan pihak yang terkait, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan politik Gus Dur di PKB. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang lebih spesifik mengenai data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan skripsi. Dalam wawancara ini penulis juga ingin mendapatkan kesaksian langsung pengalaman mereka bersama-sama mengawal perjuangan ideologi Gus Dur di PKB. kemudian hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara dijabarkan, diolah dan dianalisa dengan analisis isi dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa penguatan ideologi Pancasila yang didirikan Gus Dur pada pembentukan PKB semata-mata untuk kebaikan partai itu sendiri, selain itu untuk menjaga keutuhan NKRI dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian dalam menata hubungan antara agama dengan politik pada PKB, Gus Dur mampu menyeleraskan antara hukum nasional dengan *fiqh*. Agar PKB dapat diterima bukan hanya dikalangan warga NU melainkan di nonmuslim pula. Selanjutnya pengaruh Gus Dur dalam orientasi dan praktik politik PKB sangatlah besar, karena orientasi PKB yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam praktik politik PKB Gus Dur menuangkan pemikirannya dalam pembuatan prinsip dasar pada PKB yaitu *Mabda' Siyasi*, juga AD/ART, menentukan DPP PKB dan menentukan caleg, itu Gus Dur adalah salah satu tokoh yang berperan didalamnya.

Kata Kunci : Pemikiran Politik, Abdurrahman Wahid, PKB
Pembimbing : Dr. Rumadi, M.Ag
Daftar Pustaka : 1984 s/d 2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah yang selalu melimpahkan ketenangan serta ketentraman kepada hati setiap umat. Shalawat serta Salam tak luput selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul yang telah menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, dan yang menyempurnakan akhlak mulia. Semoga keberkahan beliau selalu mengiringi keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis, namun berkat doa, dorongan dari para pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil juga support yang sangat berharga juga bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para pembantu Dekan.
2. Ibu Dr. Maskufah, MA, Ketua Program Studi Jinayah Siyasah Jurusan Siyasah Syar'iyah.
3. Ibu Rosdiana, MA, Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Jurusan Siyasah Syar'iyah.

4. Bapak Prof, Dr. Masykuri Abdillah, MA, Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr, Rumadi, M.Ag Dosen pembimbing yang penulis hormati, dengan keikhlasannya dan kesabarannya beliau selalu memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan banyak ilmu dan waktunya dengan sangat baik, sehingga banyak pelajaran yang dapat diambil oleh penulis selama masa bimbingan dengan beliau. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau.
6. Bapak Dr. Ali masykur Musa, M.Si M.Hum dan Bapak Hz. Arifin Junaidi yang sudah bersedia menjadi nara sumber untuk penelitian ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta nikmatNya kepada beliau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memberika kemudahan bagi penulis untuk memperoleh literatur dan bahan perkuliahan.
8. Perpustakaan PBNU yang diketuai oleh Pak Syatiri Ahmad Hs dan Pojok Gus Dur oleh pak Atho, yang sudah memberikan banyak bantuan untuk bahan dan literatur pada penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga yang saya sangat banggakan, kepada Bapak Suyitno dan mamah Linah Andriyati tersayang, yang tidak pernah putus akan doa untuk anaknya, kasih sayang sepanjang masa yang tidak pernah bisa diukur dengan apapun, kesabaran, serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Tak lupa juga untuk kakak dan adik tercinta Sylwitari Rahmalita dan Muhammad Miftah

Fahmi, semoga Allah selalu melindungi dan melancarkan setiap langkahnya.

10. Untuk sahabat terbaik Siti Herawati, Abdul Mun'im Bin Alias, Siti Maesaroh, Asbullah, Euis Nurnazhofah, dan Siti NurHapipah yang sudah menjadi sahabat terbaik dikala senang dan susah. Semoga Allah mencerahkan masa depan kalian semua.

11. Teman-teman seperjuangan SJS khususnya jurusan Ketatanegaraan Islam angkatan 2011 dan Kepada teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok PENA 2014 tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Terima kasih atas kerja sama kalian semua, semoga kita bisa berkumpul lagi di lain waktu dan di kesempatan yang akan datang.

12. Kepada semua pihak yang sudah membantu penulis, mohon maaf apabila belum disebutkan. Akan tetapi, penulis berdo'a semoga agar kebaikan dan ketulusan kalian di balas oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik yang terlihat dan tersembunyi. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Ciputat, 29 Mei 2015

Penulis

Lisna Alvia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PEMIKIRAN GUS DUR	
A. Biografi Gus Dur	11
B. Pemikiran Politik Gus Dur	22
1. Gus Dur Tentang Islam dan Negara	24
2. Gus Dur Tentang Islam dan Pancasila	26
3. Gus Dur Tentang Islam dan Kemajemukan Bangsa	29

BAB III	GUS DUR DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
	A. Sejarah dan Ideologi Politik PKB	34
	B. Konflik Politik PKB	46
	C. PKB Dalam Pemilu di Indonesia 1999-2009	52
BAB IV	PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
	A. Pengaruh Gus Dur Dalam Penguatan Ideologi Pancasila yang diperjuangkan	61
	B. Pengaruh Gus Dur Dalam Hubungan Antara Agama dan Politik PKB	67
	C. Pengaruh Gus Dur Dalam Orientasi Politik dan Praktik PKB	70
	D. Faktor-faktor Pengaruh Pemikiran Gus Dur Pada Tubuh PKB...	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan ideolog Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang berdiri pada awal reformasi 1998 ini, merupakan partai politik yang lahir dari rahim NU. Gus Dur yang ketika itu masih jadi Ketua Umum PBNU merupakan figur sentral partai ini. Garis perjuangan dan ideologinya adalah garis perjuangan yang sejak lama diperjuangkan Gus Dur.

Gus Dur juga kader terbaik yang dimiliki NU, selain karena wawasannya yang luas dan banyak pemikiran-pemikiran Gus Dur yang dituangkan pada NU, Gus Dur juga mempunyai garis keturunan langsung dengan K.H. Hasyim Asy'ri pendiri NU.¹

Gus Dur tidak hanya rajin memproduksi atau mereproduksi gagasan-gagasan *geniune* melalui tulisan dan serpihan-serpihan lontaran, tapi juga mengimplementasikan melalui kepemimpinannya di organisasi Keagamaan NU.²

PKB merupakan salah satu kekuatan politik yang dapat mengawal komitmen ke-Indonesiaan, karena PKB mempunyai komitmen total atas

¹ Khamami Zada, A. Fawaid Syadzali, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hal.11

² Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKIS, 2000) hal. 129

kelangsungan negara dengan konsepsi dasar ideologi Pancasila sebagai kekuatan politik.³ Gus Dur merupakan figur penting pada partai ini, karena dengan perangkat ketokohan intelektualitas dan reputasi baik yang dimiliki Gus Dur, ia mampu membesarkan PKB, yang mampu menata hubungan Islam dengan politik pada PKB. Tanpa Gus Dur, PKB rasanya sulit untuk tumbuh dan berkembang.⁴

Visi dan kebijakan-kebijakan politik PKB akan selalu dibawah bayangan Gus Dur, karena Gus Dur yang mengarahkan dan bahkan menentukan keputusan-keputusan politik yang telah dan akan diambil oleh PKB. Selain sebagai pengayom dan pemberi restu bagi berdirinya PKB, Gus Dur secara intelektual memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengarahkan kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang harus diambil oleh PKB.⁵

Gus Dur juga merupakan seseorang yang diakui sebagai pembela kebebasan, demokrasi dan HAM yang memiliki reputasi bagus di tingkat nasional dan internasional. Tentu saja ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi PKB. Karena itu pengaruh Gus Dur dalam PKB sangat dominan. Maka ideologi Gus Dur akan selalu menjadi pola anutan dan acuan PKB dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan politiknya.⁶

³ Mahfud MD, *Gus Dur Islam, Politik dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010) hal. 108

⁴ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999) hal. 142

⁵ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, hal.151

⁶ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, hal.153

Pada tahun 2008 terjadi konflik di dalam tubuh PKB yang cukup rumit. Pada saat forum Mahfud MD berpamitan untuk menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi tiba-tiba berubah menjadi rapat rutin gabungan Ketua DPP PKB yang membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Mukhtar Luar Biasa. Isu itu dinilai untuk menggoyang Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Konflikpun berlanjut dan berimplikasi pada dikotomisasi PKB; yaitu PKB kubu Gus Dur dengan PKB kubu Muhaimin.

Pada akhirnya konflik ini dihentikan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Mukhtar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.⁷ Dari deskripsi diatas, jelas bahwa Gus Dur sangat berpengaruh pada percaturan politik PKB, banyak sekali pemikiran dan pendapat Gus Dur yang dituangkan di dalamnya sehingga membawa keuntungan terhadap PKB.

Mengingat hingga kini belum ada satu pun skripsi yang membahas tema ini, penulis merasa perlu menyajikan pembahasan dalam skripsi, dengan judul **“Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya terhadap**

⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/03164441/jalan.panjang.konflik.pkb>

Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009’.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Masalah utama yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh KH. Abdurrahman Wahid terhadap Partai Kebangkitan Bangsa?

Masalah utama ini akan diurai dalam tiga sub pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Gus Dur dalam penguatan ideologi Pancasila yang diperjuangkan di PKB?
2. Bagaimana pengaruh Gus Dur dalam menata hubungan Islam dan politik yang dianut PKB?
3. Bagaimana pengaruh Gus Dur dalam orientasi dan praktik politik PKB?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh dan perjuangan Gus Dur dalam penguatan ideologi pancasila di PKB.
 - b. Menjelaskan secara komperhensif pengaruh Gus Dur dalam menata hubungan Islam dan politik yang di anut PKB.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh Gus Dur dalam orientasi dan praktik politik PKB.
 2. Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
-

- a. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keserjanaan Program Studi Siyasa Syar'iyah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan studi komparatif dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan punya nilai signifikan bagi pemikir politik agar dapat membawa hal- hal positif dan menjadikan kaca perbandingan.
- d. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan kontribusi sejarah yang baik untuk partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan atas sejumlah penelitian tentang Gus Dur, berikut beberapa *research* yang dapat penulis kemukakan.

Pertama, berjudul “Peran Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di PKB” yang ditulis oleh Supriyadi, Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Disini di tulis secara signifikan besarnya peranan Gus Dur di PKB, sehingga membawa eksistensi PKB keranah politik yang cukup tinggi dibanding dengan partai yang baru muncul pada saat itu.

Kedua, skripsi yang berjudul “ KH. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politik Gus Dur di Indonesia”, ditulis oleh Nurhidayah, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam fakultas Adab dan Humaniora.

Disini disampaikan kontribusi besar Gus Dur pada PKB, baik menyumbangkan pemikiran-pemikirannya hingga kiprah langsung Gus Dur dalam politik PKB.

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “ Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID”, ditulis oleh Greg Barton. Barton memaparkan secara lugas beberapa hal yang terkait dengan biografi Gus Dur.

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “ Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis” ditulis oleh Munawar Ahmad, dalam buku ini ditulis tidak hanya mengurai pemikiran politik Gus Dur, tetapi juga mampu memetakan peristiwa politik dibaliknya.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian yang lain adalah dimana pada penulisan skripsi ini membahas pemikiran-pemikiran Gus Dur yang dituangkan pada politik PKB. Serta seberapa besar pengaruh Gus Dur dalam politik PKB, baik dalam ideologinya, hubungan agama dengan politik dan orientasi politik PKB serta Prakteknya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sesuatu yang penting dalam penulisan skripsi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian analitis deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun serta menganalisis, dan kemudian menafsirkannya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan analitis. Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui teori dan sumber

data yang ada, sedangkan pendekatan analistis adalah penelitian yang dilakukan langsung antara peneliti dan pihak-pihak terkait.

1. Teknis pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang objek utamanya berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti.⁸ Pengumpulan data yang akan penulis lakukan melalui beberapa metode sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan menelaah buku buku, majalah, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data dan sumber yang relevan.
- b. Wawancara, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan politik Gus Dur di PKB. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang lebih spesifik mengenai data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan skripsi. Adapun orang-orang yang akan diwawancara yaitu: (a) Ali Masykur Musa (b) Arifin Junaidi. Dalam wawancara ini penulis ingin mendapatkan kesaksian

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (palu: sinar grafika, 2009)

langsung pengalaman mereka bersama-sama mengawal perjuangan ideologi Gus Dur di PKB.

1. Teknik analisis data

Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa, agar mampu menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (berlangsung). Tujuan utama menggunakan metode penelitian ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁹

2. Teknik Penulisan Data

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku “ Pedoman Penulisan Skripsi Syari’ah dan Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2012 “.

⁹Consuelo G Selvila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press, 2006), h. 71.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang dari setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bab yang dirinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMIKIRAN POLITIK GUS DUR

Dalam bab ini membahas tentang Biografi Gus Dur, yang mana akan menjelaskan tentang perjalanan Gus Dur dalam kancah politik dan Pemikiran-pemikiran Politik Gus Dur yang dituangkan dalam ranah politik PKB.

BAB III : GUS DUR DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Materi yang diuraikan pada bab ini yaitu mengenai Sejarah dan Ideologi Politik PKB yang diperjuangkan oleh Gus Dur, serta elektabilitas PKB dalam Pemilu di Indonesia 1999-2009 dan Konflik politik dalam PKB.

BAB IV : PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Dalam bab ini membahas mengenai sejauh mana Pengaruh Gus Dur dalam penguatan Ideologi Pancasila yang diperjuangkan, serta pengaruh Gus Dur dalam Hubungan antara Agama dan Politik yang ada dalam

PKB, dan pengaruh Gus Dur dalam Orientasi Politik serta praktiknya dalam PKB. Faktor-faktor Pengaruh Pemikiran Gus Dur Pada Tubuh PKB, sehingga Gus Dur mudah diterima oleh PKB.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini juga sampaikan beberapa pokok-pokok temuan penelitian yang dihasilkan dan serta diakhir dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

PEMIKIRAN POLITIK GUS DUR

A. BIOGRAFI GUS DUR

Pada Oktober 1999, Gus Dur seorang pemimpin Islam terkemuka, yang terkenal sebagai Intelektual muslim perkotaan modern yang berpikiran liberal, terpilih menjadi Presiden pertama dalam sejarah Indonesia. Gus Dur juga memimpin organisasi Islam terbesar di dunia, namun sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar yang terletak di Indonesia, Gus Dur menentang reformis Islam yang hendak mengukuhkan kembali peran Islam dalam politik.¹

1. Latar Belakang Pendidikan Gus Dur

Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman *Ad Dhakhil* yang sekarang biasa disebut dengan (Gus Dur), lahir di Denanyar dekat Kota Jombang, Jawa Timur, pada 07 September 1940, jika menurut penanggalan Islam yaitu pada bulan Sya'ban tepatnya 04 Sya'ban.² Ia anak pertama dari enam bersaudara.

Gus Dur dilahirkan dalam lingkungan keluarga muslim Jawa terkemuka, karena kedua kakeknya merupakan pemuka agama terkenal yang dianggap sebagai pemimpin para ulama, dan juga aktif dalam pergerakan nasionalis

¹ John L. Esposito, John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 255

²Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*", (Yogyakarta : LKIS, 2002) h. 25

Indonesia. Kakek Gus Dur dari pihak ayahnya Hasyim Asyari, belajar di Mekkah dan sekembalinya dari sana mendirikan pesantren, yang dikenal juga sebagai Ulama besar dengan banyak karya tulis baik dalam bahasa arab maupun jawa. Dia juga pendiri Nahdlatul Ulama. Kakek Gus Dur dari pihak ibu Bisri Syansuri juga belajar di Mekkah dan mendirikan pesantrennya sendiri.³

Ayah Gus Dur yaitu Wahid Hasyim seorang tokoh nasionalis terkemuka. Pada tahun 1939 ia terlibat dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan pada tahun 1947 Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ibunya Gus Dur yaitu Solichah, yang tidak banyak mengenyam pendidikan, akan tetapi ia selalu ingin tahu dan mempunyai pikiran yang aktif dan keinginan yang kuat.⁴

Dengan demikian, secara genetik, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu, Gus Dur merupakan keturunan darah biru "tulen". Gus Dur kecil pertama kali menimba ilmu dari kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakenya ia diajari mengaji dan membaca Al-Qur'an. Gus Dur sudah dikenal lancar membaca Al-Qur'an pada usia lima tahun.⁵

Pada akhir tahun 1944, ketika Gus Dur baru berusia 4 tahun, ia pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya yang waktu itu menjabat Ketua I Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ia masuk ke Sekolah Dasar KRIS yang

³ John L. Esposito, John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, h. 256

⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 31-41

⁵ Wawan H. Purwanto, *The Power Of Gus Dur*, (Bandung: CMB Press, 2010) h. 2

sebelumnya pindah dari SD Matraman Perwari. Untuk memperluas pengetahuan Gus Dur, ayahnya menyarankan mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru les yang membimbing Gus Dur yaitu seorang mualaf yang bernama Williem Iskandar Bueller. Untuk menambah pelajaran Bahasa Belandanya, Iskandar selalu menyajikan musik klasik. Inilah pertama kalinya Gus Dur tertarik musik klasik. Disamping itu ayahnya menyuruh Gus Dur untuk membaca buku-buku umum, majalah dan koran untuk mengetahui informasi soal bangsa dan negara.⁶

Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sekaligus mondok di Pesantren Krapyak. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia Pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah H. Junaidi, seorang pemimpin lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP.

Ketika menjadi siswa sekolah kelanjutan pertama tersebut, minat dan hobi membaca Gus Dur semakin bersemangat, karena banyak pihak yang selalu mendorong Gus Dur agar selalu belajar menguasai ilmu pengetahuan dan lain-lain. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen mancanegara tidak luput dari perhatiannya. Disamping membaca, Gus Dur juga

⁶ Muhammad Zakki, *Gus Dur Presiden Republik Akhirat*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2010) h. 2

senang bermain bola, catur dan musik.⁷ Namun Pada tahun 1953 pula ayahnya meninggal dunia akibat dari kecelakaan, yang pada saat itu Gus Dur berusia 12 tahun. Ketika kejadian terjadi Gus Dur ikut menemani ayahnya untuk suatu pertemuan NU di Sumedang.⁸

Setelah tamat dari SMEP pada 1957, Gus Dur pindah ke Magelang ke Pesantren Tegalrejo dibawah asuhan Kiai Karismatik dan Kiai Khudori. Disini Gus Dur belajar secara penuh dengan dunia pesantren berikut segala keilmuannya. Pada saat yang sama juga ia belajar paruh waktu di Pesantren Denanyar Jombang di bawah bimbingan kakeknya dari pihak ibu. Proses belajar Gus Dur di dua Pesantren ini berlangsung selama 2 tahun.

Setelah itu Gus Dur melanjutkan belajar pesantrennya ke Jombang pada 1959. Pondok yang ia tuju adalah Pesantren Tambakberas, dibawah asuhan Kiai Wahab Hasbullah. Di pondok pesantren ini ia mendapat dorongan untuk mengajar dan bahkan pernah menjadi kepala madrasah modern, Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Dari pesantren inilah minat Gus Dur mulai bertambah, tidak hanya pada studi keislaman tetapi juga tertarik pada tradisi sufistik dan mistik dari kebudayaan dan tradisi Islam.⁹

⁷ Wawan H. Purwanto, *The Power Of Gus Dur*, h. 4

⁸ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 42

⁹ Muhammad Rifai, *Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi House of Book, cet 1, 2010) h. 33

Pada tahun 1963, Gus Dur mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-azhar di Kairo, Mesir. Sesampainya di Al-Azhar, Gus Dur diberitahu oleh pejabat kampus bahwa ia harus mengikuti kelas khususnya untuk memperbaiki bahasa arabnya. Meski sebenarnya ia sudah banyak belajar bahasa arab, karena tidak memiliki sertifikat tentang hal itu, maka Gus Dur diwajibkan mengikuti kelas khusus. Sertifikat yang ia bawa dari tanah air hanya menunjukkan bahwa ia telah lulus untuk beberapa mata pelajaran. Kelas khusus yang diambilnya memang diperuntukkan bagi pemula yang hampir tidak tahu abjad arab.¹⁰

Gus Dur menikmati hidupnya di Mesir dengan suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun Gus Dur berhasil menyelesaikan kelas khususnya, ketika itu ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa arabnya tahun 1965, Gus Dur kecewa, karena ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas.

Ditengah tidak menentunya studi tersebut, Gus Dur malah mendapat pekerjaan di Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, pada saat ia bekerja, terjadi peristiwa Gerakan September (G30S). Sebagai bagian dari upaya tersebut, kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi

¹⁰ Arif Mudatsir Mandan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2010) h. 45

terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan kepada Gus Dur.¹¹

Hingga akhir tahun 1966, perjalanan studi Gus Dur di Kairo tidak menemukan jalan terang, dan pada saat itu pun Gus Dur juga menjalin komunikasi baik dengan seorang gadis, mantan muridnya di Tambakberas, Nuriyah. Pernikahan Gus Dur baru dilaksanakan pada tahun 1967. Saat itu Gus Dur sudah tidak lagi di Mesir, melainkan sudah di Baghdad, Irak. Sementara Nuriyah baru saja menamatkan studinya di TambakBeras. Akhirnya pernikahan jarak jauh di lakukan, mereka sepakat bahwa mereka akan hidup bersama setelah keduanya menyelesaikan studi mereka.¹²

Tidak puas mengarungi ilmu di Mesir, tahun 1966 Gus Dur melanjutkan Studinya ke Irak. Gus Dur memilih jurusan sastra Arab di Universitas Baghdad sampai 1970, dan berhasil meraih gelar Lc. Selama di Baghdad Gus Dur mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Disana Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di Mesir. Pada saat itu ia kembali bersentuhan dengan buku-buku besar karya para sarjana orientalis Barat.¹³

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur

¹¹ Syamsul Hadi, *KH. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa, Bapak Pluralisme*, (Jombang: Zahra Book) h. 17

¹² Arif Mudatsir Mandan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Abdurrahman Wahid*, h. 50

¹³ A. Mubarok dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010) h. 9

ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi ia kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Di Belanda Gus Dur menetap selama enam bulan. Ia sempat mendirikan perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Dari Belanda, Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis sebelum ke Indonesia tahun 1971.¹⁴

2. Perjalanan Politik Gus Dur

Sepulang dari luar negeri pada tahun 1971, Gus Dur kembali ke Jombang dan menjadi guru di Pesantren Tebuireng, dan pada tanggal 11 September 1971, pasangan antara Gus Dur dan Nuriyah melangsungkan pesta resepsi perkawinan mereka. Dan dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai empat orang putri. Mereka adalah Alissa Qotrunnada Munawarah, Syarifah Zanuba Absah, Anita Chayatunnufus, dan Inayah Wulandari.¹⁵

Pada tahun 1974 sampai 1980 ia ditunjuk oleh pamannya HM. Yusuf Hasyim untuk menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng. Pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis di beberapa surat kabar, majalah, dan jurnal. Dalam tulisan-tulisannya, Gus Dur mengembangkan gaya bahasa yang menggabungkan bahasa harian dan humor dengan topik yang serius.

¹⁴ Syamsul Hadi, *KH. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa, Bapak Pluralisme*, h.17

¹⁵ Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Bina Utama Perkasatama Publishing, 1999) h. 8

Dalam periode ini pula ia mulai terlibat secara teratur dalam kepengurusan NU dan mengajar di beberapa sekolah lainnya.¹⁶

Pada tahun 1977 ia dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di Bidang Praktek dan Kepercayaan Islam di UNHASY (Universitas Hasyim Asy'ari) Tebuireng, juga sebagai Sekretaris Pondok Tebuireng, saat itu beliau sudah mulai menjadi penulis, lewat tulisan-tulisannya pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak orang.¹⁷

Pada awal tahun 1980 Gus Dur menjadi Sekretaris Syuriah PBNU. Disini beliau terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik. Pada saat itu pemerintah masih takut akan sikap oposisi dari organisasi muslim terbesar ini. Akibatnya, NU terjebak dalam hubungan yang antagonis dengan pemerintah. Akan tetapi pada akhirnya Gus Dur mampu mendesain penerimaan asas tunggal dari kalangan NU. Mulai sejak saat itu hubungan antara NU dan pemerintah mulai agak cair.¹⁸

Disamping kesibukannya di NU, pada awal kedatangannya di Indonesia, Gus Dur juga mulai memperluas jaringannya dengan dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan beberapa tokoh. Sejak saat itu pikiran-pikiran dan tindakan Gus Dur menjadi sesuatu yang fenomenal di Indonesia. Keberaniannya

¹⁶ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010) h. 21

¹⁷ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat* , h. 10

¹⁸ Al-Zastrauw Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999) h. 29

menentang arus tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya serta kesetiaannya pada gagasan, komitmennya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan menjadikan ia sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan dicaci hingga saat ini.¹⁹

Pada awal reformasi membuat Gus Dur tak menyia-nyiakan kesempatan untuk segera terjun ke dunia politik. maka ia pun mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini dimaksudkan sebagai wadah Nahdhiyin. Meskipun ia mengatakan bahwa partai ini adalah partai terbuka, bukan hanya untuk kalangan NU.²⁰

Peran Gus Dur dalam perpolitikan di PKB begitu besar, karena dengan ketokohan Gus Dur ia mampu membesarkan PKB. Sepertinya jika tanpa adanya Gus Dur mungkin PKB tak akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bayang-bayang Gus Dur dalam visi, misi dan perilaku politik PKB sangat dominan. Gus Dur sangat mempengaruhi gerak langkah PKB dipentas percaturan politik nasional sejak partai ini berdiri.²¹

Sejak PKB didirikan pada bulan juli 1998, banyak dari anggota partai ini yang berharap bahwa Gus Dur akan menjadi Presiden. Paling tidak mereka mempunyai hak untuk mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden. Pada tanggal 7 Februari 1999 akhirnya Ketua Umum PKB, mengumumkan bahwa PKB akan

¹⁹ Al-Zastraw Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?*, h. 31

²⁰ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, h. 22

²¹ Faisal Ismail. *NU Gusdurisme Dan Politik Kiai*, h. 144

mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden. Gus Dur menjadi Ketua Dewan Syuro pertama partai tersebut.²²

Pada tanggal 20 Oktober 1999, dalam pemilihan Presiden di gedung DPR-MPR, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia yang ke empat dengan 373 suara. Reformasi pertama yang dilakukan Gus Dur adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media, dan membubarkan Departemen Sosial yang korup. Gus Dur juga memberikan keistimewaan menerapkan syariat Islam kepada rakyat Aceh. Pada Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan merubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Tak heran jika kini Gus Dur diberi gelar sebagai “Bapak Orang Papua” oleh masyarakat Papua.²³

Selama menjabat sebagai Presiden, banyak langkah yang telah dilakukannya untuk mencoba mengubah keadaan negeri ini dan memberikan ruang kebebasan yang demikian luas, langkah-langkahnya banyak menimbulkan kontroversi. Banyak orang, baik yang pro maupun yang kontra terhadapnya, yang tak dapat memahami tindakan-tindakannya.²⁴ Pada akhir November tahun 2000, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

Pada 1 Februari 2001, DPR bertemu untuk mengeluarkan Nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR dimana

²² Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 324

²³ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, “Biografi Singkat”, A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, h. 21

²⁴ Ali Yahya, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, h. 23

pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Akhirnya pada 23 juli 2001, MPR resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.²⁵

Setelah berhenti dari jabatannya, Gus Dur tetap berjuang dan tetap lantang menyuarakan kebenaran. Sebenarnya sudah lama Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Beberapa kali Gus Dur mengalami serangan stroke, diabetes dan ginjal. Namun ia selalu bilang sehat-sehat saja kepada semua orang yang menemuinya.

Pada pemilihan presiden tahun 2004, PKB memilih Gus Dur menjadi Presiden kembali. Namun Gus Dur dijegal dengan peraturan KPU tentang kesehatan calon. Pada agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Gus Dur mengunjungi teman akrabnya, KH Mustafa Bisri di Rembang Jawa Tengah, lalu melanjutkan ke Jombang untuk ziarah ke kakeknya, KH. Wahab Hasbullah. Karena, kelelahan kondisi fisik Gus Dur drop sehingga harus dirawat di RSUD Swadana Jombang.

Setelah agak membaik, Gus Dur disarankan untuk dirawat di Rumah Sakit Dr Sutomo Surabaya, akan tetapi batal dan langsung dirujuk ke Rumah

²⁵ A. Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, h .23

Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Hari rabu, 30 Desember 2009, kondisi Gus Dur dinyatakan kritis pukul 11.00 WIB. Kondisinya memburuk akibat komplikasi penyakit ginjal dan diabetes yang di deritanya. Pada pukul 18.45 WIB Sesuai keterangan dokter, Gus Dur menghembuskan nafas terakhir.

Kepergian tokoh besar Indonesia ini bukan saja menyedot perhatian masyarakat di tanah air, namun juga mengejutkan dunia Internasional. Mantan Presiden RI ke 4 itu banyak menyisakan sejuta kenangan dikalangan teman, politisi, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia maupun di dunia.²⁶

B. PEMIKIRAN POLITIK GUS DUR

Memperhatikan latar sosial Abdurrahman Wahid yang lahir dan dibesarkan dalam kalangan pesantren menjadi wajar bila ia kemudian mengawali perjalanan intelektualitasnya yang tidak pernah lepas dari kultur tersebut. Hampir semua perjalanan intelektualitas Gus Dur selalu bersentuhan dengan pengaruh pesantren atau dalam banyak hal pemikiran-pemikiran sosial keagamaan. Berbagai bentuk pengalaman hidupnya yang cukup unik telah ikut mengantarkan proses pematangan pemikiran dan pengembaraan intelektualnya secara mendalam.²⁷

²⁶ A. Mubarok dan Fathurrahman Karyadi, "Biografi Singkat", A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, h. 24

²⁷Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Jogjakarta, 2004) h. 74

Abdurrahman Wahid termasuk tokoh intelektual yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berwawasan ke depan. Gagasan-gagasannya seperti pribumisasi Islam di Indonesia, penghormatan terhadap hak-hak kaum minoritas, reformasi kultural, demokratisasi, dan juga toleransi keberagaman merupakan sejumlah contoh tema aktual yang selalu ditawarkan dalam berbagai kesempatan.²⁸

Gus Dur juga tokoh yang selalu membuat berita. Wacana-wacana politik di Tanah Air, rasanya kurang lengkap bila tidak disertai tanggapan atau komentar Gus Dur. Dalam setiap kesempatan dia sering diminta wawancara baik wawancara domestik maupun luar negeri, untuk menanggapi atau mengomentari diskursus-diskursus politik yang hangat dan aktual. Gus Dur sendiri bukanlah tokoh politik praktis, tetapi lebih menonjol sebagai sosok seorang intelektual, pengamat dan pemerhati politik.²⁹

Cara pandang Gus Dur dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di Indonesia bisa dibilang memiliki nuansa yang khas dan spesifik. Gus Dur walaupun sangat kental mendapat pendidikan dari ilmu-ilmu klasik pesantren, namun ia mampu memasuki pemikiran modern dan bahkan sering berbagai pemikiran yang ia lontarkan terkesan sangat berwawasan jauh kedepannya.

²⁸ Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, h. 13

²⁹ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, h. 49

Walaupun terkadang banyak orang dibuat geleng kepala akibat sikap dan pemikiran Gus Dur yang sering dibilang “*nyeleneh*”, namun Gus Dur akan jalan terus dengan berbagai gagasan- gagasannya itu.³⁰

1. Gus Dur Tentang Islam dan Negara

Pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dan negara sangat menarik, karena berada di ranah filosofis. Artinya Gus Dur ternyata bukan seorang ideolog Islam yang mencitakan terbentuknya masyarakat Islami secara total. Bukan pula kaum sekuler yang hendak memisahkan antara Islam dan negara. Akan tetapi Gus Dur adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber-sumber keislaman. Dengan demikian secara esensial, Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam.³¹ Gus Dur menyatakan:

Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses oemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW, baik melalui ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada *dalil naqli* tetapi pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu.³²

Pada konsep Islam tentang negara, yang diperdebatkan oleh beberapa pemikir dan yang lainnya. Banyak diajukan pemikiran tentang negara Islam,

³⁰ Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, h. 14

³¹ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) h. 151

³² Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999) h. 56

yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu maka dinilai telah meninggalkan Islam. Disini Gus Dur beranggapan bahwa, Islam sebagai jalan hidup (*syari'ah*) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Karena sepanjang hidupnya, Gus Dur telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. sepanjang hidupnya ia belum menemukannya, jadi tidak salah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Rasulullah SAW digantikan Abu Bakar tiga hari setelah beliau wafat melalui *bai'at/prasetia*.

Kedua, besarnya negara yang dikonsepsikan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Dari gagasan diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin yang terlalu memandang Islam dari sudut institusional belaka.³³

Ada tiga pilar pemikiran Gus Dur : (1) keyakinan bahwa Islam harus secara aktif dan substantif ditafsirkan ulang atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern, (2) keyakinannya bahwa, dalam konteks

³³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) h. 81

Indonesia, Islam tidak boleh menjadi agama negara, dan bahwa (3) Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif.³⁴

2. Gus Dur Tentang Islam dan Pancasila

Menurut Gus Dur dalam pandangannya mengenai hubungan agama dan ideologi negara yang sering di perdebatkan oleh para pemikir-pemikir dari zaman ke zaman. Gus Dur memaparkan bahwa jalinan sangat kuat antara aspirasi keagamaan dan aspirasi di luar lingkup keagamaan (seperti penegak keadilan, penumbuhan demokrasi, penjagaan kelestarian alam dan pembangunan struktur ekonomi yang berwatak kerakyatan). Ajaran- ajaran agama justru dijadikan sumber inspirasional bagi aspirasi “non keagamaan” tersebut dikalangan gerakan- gerakan keagamaan yang menyajikan alternatif bagi sistem pemerintahan yang monolitis.³⁵ Gus Dur menulis:

Dalam konteks agama sebagai sumber bagi Pancasila, dengan pengambilan intinya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha esa, maka wajar saja kalau nilai-nilai luhur agama disepar oleh Pancasila, dan nilai-nilai luhur itulah yang sebenarnya melakukan pengaturan hubungan antar organisasi, antar golongan, dan antaragama. Jika tidak demikian, maka akan terjadi kerancuan dan kebalauan dalam pola hubungan antargolongan, antaragama, dan antar-paham, karena langkahnya standar atau ukuran baku yang digunakan. Memang masih harus dilakukan penyesuaian taktis sebelum asas Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan dan kekuatan sosial politik. Namun, prinsip bahwa Pancasila adalah tolok

³⁴ John L. Esposito, John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, h. 264

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The wahid Institute, 2007) h. 164

ukur yang standar dalam hubungan antar komponen kehidupan bangsa adalah sesuatu yang dapat dimengerti.³⁶

Gus Dur menempatkan Pancasila dan Islam secara proposional. Pancasila adalah landasan konstitusional bernegara. Sementara Islam adalah akidah kehidupan masyarakat. Sebagai landasan konstitusional, Pancasila tentu tidak akan mampu mengganti akidah sebab akidah berkaitan dengan dasar keyakinan hidup yang paling utama, sementara landasan konstitusi terkait dengan kebutuhan kehidupan kolektif bernegara. Dengan adanya landasan konstitusional, Pancasila akan menjadi penjamin bagi kehidupan keislaman itu sendiri, dengan ukuran tidak ada peraturan negara yang bertentangan dengan akidah Islam.³⁷

Menurut Gus Dur sebagaimana dikutip Syaiful Arif yang menyatakan bahwa:

Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan UU maupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.³⁸

Gus Dur menjelaskan mengenai hubungan Islam, negara dan pancasila. Bahwa model hubungan pertama antara Islam dan pancasila itu, yaitu agama mengejawantah dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dan negara merupakan kerangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin. Karena, dalam negara yang demikian majemuk

³⁶ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, h.94

³⁷ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, h. 171

³⁸ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, h.171

susunan warga negara dan situasi geografisnya, Islam ternyata bukan satu-satunya agama yang ada. Dengan demikian, negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang di akui. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pancasila dan Islam tidak memiliki pola hubungan yang bersifat polaritatif (kecenderungan), tetapi pola hubungan dialogis (Terbuka atau Komunikatif) yang sehat, yang berjalan terus-menerus secara dinamis.³⁹

Implementasi negara demokratis, dalam konteks ini Gus Dur mengatakan, demokrasi itu harus *take and give*. Demokrasi yang diinginkan Gus Dur adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat. Hal ini di tegaskan oleh Gus Dur sebagai berikut:

Bahwa agama dapat memberikan sumbangan bagi proses demokratisasi, manakala ia sendiri berwatak membebaskan. Fungsi pembebasan agama atas kehidupan masyarakat itu tidak dapat dilakukan setengah-setengah, karena pada hakekatnya, transformasi kehidupan haruslah bersifat tuntas. Pandangan tentang tiadanya hak bagi warga negara non muslim untuk menjadi kepala negara di negeri kita saat ini, juga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dasar kita sendiri, di samping pengingkaran terhadap demokrasi. Pandangan seperti itu berarti melebihkan kedudukan sebuah agama, dalam hal ini Islam, yang menjadi agama mayoritas penduduk, atas agama-agama lain dan dengan demikian melanggar prinsip demokrasi yang terkandung baik dalam pembukaan maupun pasal 29 ayat 2 UUD 1945.⁴⁰

Konsisten Gus Dur untuk mengembangkan demokrasi dan toleransi dalam negara Pancasila dapat dilihat pada pembentukan Forum Demokrasi dimana Gus Dur sendiri yang menjadi ketua forum tersebut. Gus Dur konsisten

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, h. 93

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, h. 287

mengembangkan demokrasi dan pluralisme tidak saja dalam lingkungan eksternal kehidupan kebangsaan, melainkan juga dalam lingkungan internal NU.⁴¹

Sebuah tuduhan besar di ajukan oleh H.M. Yusuf Hasyim, tuduhan yang diajukannya cukup menarik yaitu: PKB meninggalkan perjuangan Syariah dan mengusahakan adanya negara sekuler, nasionalis, dan demokrasi sebagai dasar pijakannya. Dijelaskan oleh Gus Dur bahwa PKB mengutamakan kepentingan nasional. Untuk menyesuaikan kepentingan hukum nasional dengan *fiqh*, PKB dalam hal ini tentu akan bertindak mengutamakan substansi hukum Islam melalui hukum nasional dan bukannya mengutamakan simbol-simbol formal keagamaan. Karena, Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan kepentingan-kepentingan nasional sendiri dan bukan sebuah negara agama.⁴²

3. Gus Dur Tentang Islam dan Kemajemukan Bangsa

Pluralisme dapat dipahami sebagai : (1) suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik. (2) keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan kelembagaan.

Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut diperlukan adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya

⁴¹ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, h. 115

⁴² Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, h. 349

permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Persoalan yang muncul ini terutama berhubungan dengan ras atau agama.⁴³

Gus Dur sangat mendukung pluralisme, baik pluralisme sosial maupun politik dan hal ini dinyatakan tidak hanya dalam bentuk ide tetapi juga sikap. Pandangannya tentang posisi kedaulatan rakyat dan posisi *Syari'ah* memberikan landasan bagi hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan nilai-nilai demokrasi, seperti persamaan, pluralisme dan toleransi. Oleh karena itu, dalam konteks kedudukan muslim dan non muslim, suatu hal yang menjadi titik krusial dalam kehidupan sosial dan politik di dunia Islam, Gus Dur melakukan reinteroretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits dan hal ini juga dilakukan oleh ulama klasik.⁴⁴ Gus Dur menyatakan:

Tugas Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara maupun diluarnya. Fungsionalisasi etika sosial dapat saja berbentuk pengundangan melalui hukum formal, maupun sekedar melalui penyadaran masyarakat akan kepentingan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa universalitas nilai-nilai Islam dapat difungsikan sepenuhnya dalam sebuah masyarakat bangsa, terlepas dari bentuk negara yang digunakan.⁴⁵

⁴³Masykuri Abdillah,"Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme", Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 1999) h. 195

⁴⁴ Masykuri Abdillah,"Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme", Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, h. 196

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, h.77

Indonesia adalah negara pluralisme, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat-istiadat. Melihat kenyataan itu Gus Dur berpendapat bahwa nilai- nilai Indonesia yang harus dijunjung tinggi yaitu berupa solidaritas sosial, yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa mengucilkan getaran rasa impulsif untuk mengutamakan kelompok- kelompok yang lebih sempit, nilai-nilai yang menampilkan watak kosmopolitan, yang masih diimbangi oleh rasa keagamaan yang kuat, kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan pengaturan kembali masyarakat (*social engineering*) berlingkup luas, tetapi dengan sikap rendah hati yang timbul dari kesadaran akan kekuatan masyarakat.⁴⁶

Dalam pandangan Gus Dur, Islam anti untuk mendiskriminasi berbagai macam latar belakang tersebut, tidak boleh adanya diskriminasi berdasarkan agama, diskriminasi berdasarkan suku dan diskriminasi adat istiadat. Gus Dur menyatakan dalam tulisannya:

Diskriminasi memang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan diantara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan Islam, wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah bangsa besar, seperti manusia Indonesia. Kitab suci Al-Qura'an menyebutkan: "Berpeganglah kalian kepada tali Tuhan dan secara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling bertentangan (*wa'tashimu bi habli Allah jami'an wa la tafarraqu*)" (QS. Ali Imran: 130). Ayat kitab suci tersebut jelas membedakan perbedaan pendapat dengan pertentangan, yang memang nyata-nyata dilarang.⁴⁷

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 1999) h. 109

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam kita*, h. 154

Memperhatikan sifat pluralistas bangsa Indonesia tentang merosotnya semangat kebangsaan dan mengedepannya semangat agama, etnis, dan daerah telah menimbulkan solidaritas sempit dalam bentuk keagamaan. Hal ini mendapat respon oleh Gus Dur yang menyatakan bahwa harus adanya nilai baru yang dikembangkan.

Pertama, haruslah dikembangkan semangat untuk tidak hanya menghormati orang lain, melainkan juga untuk mengerti kesulitan yang dihadapinya. Kedua, harus ditumbuhkan kesadaran untuk mementingkan bangsa diatas kelompok sendiri. Pengembangan dari kedua nilai tersebut sangat penting untuk melahirkan solidaritas yang tulus dari berbagai kelompok etnis, agama, budaya dan lain sebagainya sebagai dasar dari pembentukkan bangsa Indonesia.⁴⁸

Pendapat tersebut juga dibuktikan dalam sikap Gus Dur dalam membela kepentingan minoritas non muslim, antara lain dalam bentuk kritik Gus Dur terhadap kasus Monitor dan pendirian ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, dengan disertai hubungan kemanusiaan yang baik dengan non muslim itu, mereka merasa mendapat perlindungan dari Gus Dur. Hal ini terbukti, misalnya, ketika terjadi peristiwa huruhara pembakaran dan penjarahan kota Jakarta pada 14-15 Mei 1998, banyak dari tokoh-tokoh non muslim mendatangi kediaman Gus Dur. Meski demikian, Gus Dur tetap membedakan sikap inklusivismenya dalam

⁴⁸ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, h. 107

melihat agama-agama itu antara aspek teologi dengan aspek sosial. Menurutnya, secara teologis terdapat perbedaan esensial antara agama-agama di dunia ini, karena masing-masing mengandung ajaran yang unik. Namun keunikan ini harus “dikontrol” dan “dikaitkan” dengan memberi perlakuan dan kedudukan yang sama dimuka hukum bagi semua warga negara.⁴⁹



⁴⁹ Masykuri Abdillah, "Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme", Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, h.197

BAB III

GUS DUR DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. Sejarah dan Ideologi Politik PKB

PKB yang didirikan pada awal reformasi ini dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998, Ciganjur, Jakarta Selatan bertempat di kediaman Gus Dur. Awal mula sejarah berdirinya partai PKB yaitu, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto *lengser* karena desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai *istighosah* dan sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.¹

Merespon usulan dari para pihak warga NU tersebut, PBNU bersikap hati-hati. Sebab, sejak kembali ke *khittah* 1926 pada Mukhtamar Situbondo tahun

¹ DPW PKB Jawa Tengah, *Partai Untuk Rakyat*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2003) h. 115

1984, NU telah memutuskan untuk meninggalkan gelanggang politik praktis dan menyatakan berjarak dari semua kekuatan politik.² Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.³

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang dalam akhir rapatnya menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriah/ Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A (Wakil Katib Aam PBNU) dan Ahmad Bagdja. Untuk mengatasi hambatan organisatoris, tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Tim Lima ini berikutnya menjadi wadah untuk membentuk partai politik sebagai penampung aspirasi politik warga NU⁴.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan partai politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi surat tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi, Muhyidin Arubusman, H.M Fachri Thaha

² A. Effendi Choirie, *PKB Dari NU Untuk Indonesia*, (Jakarta Selatan: Levira Foundation, 2008) h. 16

³ DPW PKB Jawa Tengah, *Partai Untuk Rakyat*, h. 116

⁴ Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB (Aktualisasi PKB Sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern)*, (Malang: Averroes Press, 2005) h. 18

Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.⁵

Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan menjabarkan ruang lingkup tugasnya. Seterusnya pada tanggal 26- 28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan pertemuan untuk menyusun konsep awal pembentukan partai politik. pertemuan itu menghasilkan lima rancangan: (1) Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, (2) *Mabda' Siyasi*, (3) Hubungan partai politik dengan NU, (4) AD/ART, dan (5) Naskah Deklarasi.⁶

Setelah dibahas dalam berbagai diskusi yang intensif, semua rancangan itu dibawa ke forum "Silaturrahi Nasional Ulama dan Tokoh- tokoh NU" di hotel Bandung, Bandung, Jawa Barat yang diadakan pada tanggal 4-5 Juli 1998 untuk memperoleh masukan. Silaturrahi yang dihadiri oleh peserta dari 22 PWNU, Penggagas, Ulama dan para tokoh NU yang menghasilkan banyak masukan kepada Tim Lima dan Tim Asistensi. Mengenai nama parpol, Silaturrahi memberi masukan tiga alternatif, yakni Partai Nahdlatul Ummah,

⁵Hakim Jayli dan Mohammad Tohadi, *PKB dan Pemilu 2004*, (Jakarta Selatan: Lembaga Pemenang Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2003) h. 4

⁶A. Effendi Choirie, *PKB Dari NU Untuk Indonesia*, h. 19

Partai Kebangkitan Ummat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk lima rancangan yang disiapkan oleh tim lima dan tim asistensi tersebut, forum silaturahmi memberi banyak masukan. Namun forum menyerahkan sepenuhnya kepada tim lima dan tim asistensi untuk melakukan perumusan akhir.⁷

Setelah melalui diskusi verifikasi pada tanggal 30 Juni 1998, dan pertemuan finalisasi yang berlangsung pada tanggal 17 Juli 1998, maka Tim Lima dan Tim Asistensi menyerahkan hasil akhir rancangannya kepada Rapat Harian PBNU pada tanggal 22 Juli 1998.⁸

Setelah PBNU menerima dan menyepakati tentang pendirian partai baru tersebut, baik dari segi nama, sifat, visi, misi dan platform politiknya, pleno PBNU masih mempunyai satu beban, yakni rekrutmen pengurus partai, terutama menyangkut ketua umum partai. Dalam rapat plenonya tanggal 22 Juli 1998, pembicaraan masalah Ketua Umum sangat rumit sehingga sempat mengalami *deadlock*. Akhirnya rapat sepakat bahwa soal kepengurusan akan dikonsultasikan dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Meskipun persoalan kepengurusan belum tuntas, akan tetapi rencana deklarasi PKB besoknya tanggal 23 Juli 1998 tetap akan dilaksanakan.⁹

Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1998, partai warga NU yang diberi nama “Partai Kebangkitan Bangsa” di deklarasikan di halaman kediaman KH.

⁷ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali Ke Khittah 1926*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002) h. 187

⁸ Andi Muawiyah Ramly, *Saya Bekerja Maka PKB Menang*, h. 26

⁹ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 189

Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan. Deklaratornya terdiri dari: KH. Moenasir Ali, KH. Muchith Muzadi, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Musthofa Bisri dan KH. Abdurrahman Wahid.¹⁰

Bersamaan dengan dideklarasikanya partai, Deklarator juga menetapkan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB untuk masa bakti 1998-1999. Terdiri dari Dewan Syuro sebanyak dua belas orang dan Dewan Tanfidz sebanyak enam belas orang. Diantaranya adalah:

1. Dewan Syura

Ketua	: KH. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	: KH. M.Cholil Bisri
Sekretaris	: KH. Drs. Darwam Anwar
Anggota	: Brigjen TNI (Purn) Sulam Samsun KHM. Hasyim Latief Dr. KH. Nahrawi Abdus Salam, MA KH. Mukeri Gawith, MA KH. Yusuf Muhammad, Lc KH. Dimiyati Rais Hj. Sariani Thaha Ma'ruf TGH. Turmudzi Badruddin KH. Syarif Usman Bin Yahya

2. Dewan Tanfidz

Ketua Umum	: H. Matori Abdul Djalil
Ketua	: Dr. H. Alwi Syihab
Ketua	: Dra. Hj. Umroh M. Thalhah Mansoer
Ketua	: H. Agus Suflihat
Ketua	: H. Amru Al-Mu'tasim
Ketua	: KHM. Buchari Chalil AG
Ketua	: H. Taufiqurrahman, SH., M.Si
Ketua	: H. Yafie Thahie
Ketua	: Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa

¹⁰ Andi Muawiyah Ramly, *Saya Bekerja Maka PKB Menang*, h. 26

Sekretaris Jendral : A. Muhaimin Iskandar
Wakil Sekjend : Amin Said Husni
Wakil Sekjend : H. Aris Azhari Siagian
Wakil Sekjend : Yahya C. Staquf
Bendahara : H. Imam Churmen
Wakil Bendahara : H. Ali Mubarak
Wakil Bendahara : H. Syafrin Romas

DPP PKB dengan komposisi sebagaimana tersebut, merupakan kepengurusan periode pertama yang memikul tugas dan tanggung jawab yang amat berat. Yaitu mempersiapkan PKB yang baru lahir untuk ikut bertanding, sekaligus memenangkan pemilu 1999. Hanya dalam waktu kurang lebih dari tiga ratus hari atau sepuluh bulan. Terhitung sejak partai ini dideklarasikan hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 7 Juni 1999. Padahal dari segi sumberdaya dan sumberdana sangatlah minimal, kecuali jumlah massa NU yang memberikan harapan sebagai sumber penghasil suara.¹¹

Kelahiran PKB tidak terlepas dari berbagai tarikan nilai, ideologi dan faktor-faktor politik lainnya. PKB, upaya pencarian identitas nilai dan ideologi dirinya ditempuh melalui jalan panjang yang tercermin dalam proses dan sejarah berdirinya.

Dalam sejarah politik di Indonesia, NU tercatat sebagai kekuatan politik yang disamping berlatar belakang ideologi Islam, juga sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang berpegang pada prinsip pluralisme, khususnya karena peranannya dalam perumusan Dasar

¹¹ Dokumen Muktamar I PKB, *Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia Sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, 2000) h. 20

Negara Pancasila tahun 1945, dan pandangannya bahwa Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, visi dan misi PKB juga terikat dengan prinsip-prinsip ke-Islaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi pegangan NU.¹²

PKB adalah partai yang berasaskan Pancasila. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PKB disebutkan: “Partai berasaskan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sementara dalam Pasal 4 disebutkan: “Prinsip perjuangan Partai adalah mengabdikan kepada Allah SWT, yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*.”

Asas Pancasila dipilih dengan alasan yang sangat kuat secara hukum agama (*fiqih*) maupun sejarah politik bangsa dimana para ulama terlibat dalam proses-proses penting didalamnya. PKB secara sungguh-sungguh dan konsisten ingin menjaga, meneruskan dan mengembangkan apa yang sudah dirintis dan dirumuskan oleh para ulama mengenai status Fiqih dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹³

¹² A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 211

¹³ A. Effendi Choirie, *PKB Dari NU Untuk Indonesia*, h. 26

Letak keistimewaan ideologi PKB yaitu “Mabda’ Siyasi” yang mana di dalamnya mencakup *jawhar* (substansi) yang mencakup kultur keindonesiaan, keislaman salaf yang di padu dengan nasionalisme. Mabda’ siyasi merupakan ruh dari PKB dan merupakan sumber nilai segala kegiatan dan aktivitas PKB¹⁴.

Mabda’ Siyasi PKB memuat 9 nilai utama dan ditetapkan sebagai dokumen historis PKB dalam Mukhtamar I PKB di Surabaya tanggal 23-28 Juli 2000.¹⁵

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermatabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*) dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam

¹⁴ Kelompok Kerja LPP DPP PKB, *Orientasi Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta, LPP DPP PKB, 2002) h. 59

¹⁵ Andi Muawitah Ramly, *Saya Bekerja Maka PKB Menang*, h. 49

segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu menjawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas penghidupan/ perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan ber-ekspresi serta berpendapat (*hifzu al-aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.
4. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan

penetapan kebijakan publik jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenang dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya

adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Asas dan prinsip perjuangan PKB sebagai penjelas misi partai, yakni seperti bunyi lima sila dalam Pancasila. Pada Anggaran Dasar (AD) partai, termaktub dalam pasal 3 PKB tahun 1998-2000. Sifat dan fungsi PKB yang juga masih menjelaskan misi partai yaitu, bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. Tujuan dan usaha PKB sebagai penjelas visi partai, yakni mewujudkan

cita-cita Kemerdekaan RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual serta mewujudkan tatanan politik yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah.¹⁶

Dalam hal visi tentang hubungan Islam dan negara dalam konteks ke Indonesiaan, PKB berpendapat bahwa sampai hari ini masih tumbuh subur orientasi politisasi agama untuk mempertahankan status quo atau mendapatkan kepentingan politik tertentu. Eksploitasi simbol-simbol gerakan politik atas nama agama merupakan perilaku politik yang harus dikecam oleh semua pihak, karena selain mereduksi fungsi dan sakralitas agama itu sendiri, juga akan melahirkan radikalisme agama yang sangat membahayakan bagi lahirnya antagonisme antar umat beragama yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini PKB menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah ikhtiar maksimal umat Islam di Indonesia, dan keberadaannya adalah sah serta mengikat seluruh umat Islam di Indonesia.¹⁷

B. Konflik Politik

Definisi sederhana konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-

¹⁶ Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB Aktualisasi PKB Sebagai Partai Kerja Partai Nasional dan Partai Modern*, (Malang: Averroes Press, 2005) h. 28

¹⁷ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 213

sasaran yang tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.¹⁸

Konflik dalam tubuh partai politik merupakan hal yang wajar. Ia adalah keniscayaan, sebab politik merupakan tempat dimana konflik diartikulasikan dan dicarikan pemecahan terbaiknya. Namun demikian, konflik harus dikendalikan, harus dikelola agar tidak merusak organisasi dan soliditas kader. Kemampuan mengelola konflik yang sering disebut sebagai manajemen konflik merupakan prasyarat dasar agar konflik-konflik dalam partai bermakna positif, bukan negatif. Konflik yang tidak berhasil dikelola dengan baik dapat mendinamisasi kehidupan organisasi. Sebaliknya, konflik yang tidak berhasil dikelola dengan baik akan merusak organisasi dan kelak menghancurkan eksistensinya dimasyarakat.

PKB tergolong partai yang unik dalam keberhadapannya dengan konflik politik internalnya. Unik karena konflik dalam tubuh partai besutan kiai-kiai NU ini terlalu sering muncul dan mencuat kepermukaan. Konfliknya pun seiring kali bersifat tak terdamaikan. Sehingga selalu saja ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam kerangka inilah PKB boleh disebut gagal mengelola konflik internalnya menjadi sesuatu yang produktif bagi kemajuan partai. Dari konflik ke

¹⁸ Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB Aktualisasi PKB Sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*, h. 49

konflik eksistensi PKB semakin kecil sebagaimana terlihat dari perolehan suara partai ini yang terus menerus menurun dari pemilu ke pemilu.¹⁹

Konflik internal yang berlangsung pada pertengahan Juli 2001 antara Gus Dur dan Matori Abdul Djali telah membuat partai ini kehilangan energi untuk melakukan konsolidasi politik dan organisasi dalam mengejar target pemilu 2004 itu, PKB terhempas cukup keras bukan oleh kekuatan partai-partai lain yang semakin dahsyat, melainkan oleh kegagalannya sendiri dalam mengelola konflik internal yang berimplikasi pada perpecahan politik.²⁰

Konflik ini berawal pada saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB berbeda pandangan mengenai situasi politik kontemporer dengan Matori Abdul Djali, Ketua Umum Dewan Tanfidz. Matori yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua MPR RI, memutuskan menghadiri sidang istimewa MPR RI yang mengagendakan pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan 2001. Padahal DPP PKB saat itu telah mengintruksikan kepada seluruh anggota fraksi PKB di DPR/MPR untuk tidak menghadiri sidang.

Begitulah, pada akhirnya Matori diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Gus Dur dilengserkan dari kepresidenan melalui SI MPR yang menegangkan.²¹

¹⁹ *Bebal Sejarah PKB Dalam Pusaran Konflik dan Konflik* (Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Bangsa, 2008) h. 22

²⁰ *Bebal Sejarah PKB*, h. 21

²¹ *Bebal Sejarah PKB*, h. 24

Pada periode berikutnya, konflik internal kembali mencuat ke permukaan. Lagi-lagi konflik ini melibatkan Gus Dur, dan kali ini dengan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Konflik ini berawal dipicu oleh pemecatan dengan hormat Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB, karena keduanya rangkap jabatan sebagai Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Banyak pihak yang mencoba menafsirkan kemauan Gus Dur atas pemecatan Gus Ipul yang merupakan keponakannya sendiri, manuver Gus Dur diyakini sebagai bagian kaderisasi. Gus Dur dinilai mampu melihat tantangan PKB dan kader-kader NU ke depan yang tentunya makin berat. Untuk itu perlu kader yang handal dan berani mengambil keputusan yang taktis dan strategis. Namun, Saifullah Yusuf adalah kader NU yang memiliki kepiawaian dalam berpolitik, tidak seperti kader NU lain yang terkesan masih polos dan hitam putih dalam berpolitik. Ada pula yang menafsirkan bahwa Gus Dur hendak memberi angin pada keponakan yang lain yakni Muhaimin Iskandar yang pada saat itu menggantikan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PKB.²²

Akibat dari konflik ini membuat perpecahan pada partai, masing-masing kubu saling mendelegitimasi, yang kemudian berujung pada pembentukan partai

²² Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Mendayung di Pusaran*, (Jakarta: PT Inti Bintang Cemerlang, 2004) h. 253

politik baru pada tanggal 21 November 2006, yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).²³

Berlanjut lagi Pada tahun 2008 adanya konflik di tubuh PKB yang cukup rumit. Dimana yang pada saat forum Mahfud MD berpamitan untuk menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi tiba-tiba berubah menjadi rapat rutin gabungan Ketua DPP PKB yang membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Muktamar Luar Biasa. Isu itu dinilai untuk menggoyang Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Alasan pemberhentian itu sendiri, karena adanya pelanggaran normatif Ketua Dewan Tanfidz terhadap peraturan atau AD/RT Partai atau karna adanya tendensi politis.

Konflikpun berlanjut dan berimplikasi pada dikotomisasi PKB; yaitu PKB kubu Gus Dur dengan PKB kubu Muhaimin. Masing-masing menyatakan bahwa PKB-nya lah yang sah. Gus Dur mengklaim “bahwa dari 427 DPC PKB, hanya 7 yang mendukung Muhaimin. 420 dukung kita”, kubu Gus Dur juga mengatakan bahwa mereka telah mengikuti ketentuan yang sah, ketentuan normatif UU No 2/2008 yang terbaru sebagai perubahan UU No 31/2002. Selanjutnya kubu Gus Dur menegaskan bahwa Depkum dan HAM akan mengakui PKB versi Gus Dur.

²³ *Bebal Sejarah PKB*, h. 27

Sementara pembelaan-pembelaanpun muncul dari PKB kubu Muhaimin. Tindakan pemecatan yang dilakukan DPP PKB terhadap Muhaimin Iskandar, menurut Muhaimin menyalahi AD/RT.

Konflik semakin tajam saat masing-masing kubu menggelar musyawarah luar biasa (MLB) dalam tenggat waktu yang hampir bersamaan. Pada tanggal 30 April – 1 Mei 2008 kubu Gus Dur menggelar MLB di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung, Bogor, Jawa Barat. Sementara pada tanggal 2 – 4 Mei 2008 kubu Muhaimin mengadakan MLB di bilangan Ancol, tepatnya di Hotel Mercural. Masing-masing pelaksanaan MLB memiliki agenda yang saling mendeligitimasi kubu lawan.

Pada akhirnya konflik ini dihentikan oleh Kasasi PKB Gus Dur di Mahkamah Agung terkait konflik PKB ditolak. Dalam putusan kasasi bernomor 441/KasusKasasi/Pdt/2008 itu, MA memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.²⁴

Membina konflik internal dalam partai politik itu sangatlah penting agar tidak berakibat buruk pada partainya. Dan konflik yang terjadi pada PKB ini dapat diambil menjadi pembelajaran pada partai ini agar tidak terjadi lagi konflik yang membuat kerugian tersendiri pada partainya.

²⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/03164441/jalan.panjang.konflik.pkb>

C. PKB Dalam Pemilu di Indonesia 1999- 2009

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru telah membuka pintu politik yang sebelumnya tertutup dan juga merupakan peluang bagi pembaharuan sistem politik Indonesia. Salah satu yang menjadi tuntutan reformasi adalah perubahan sistem kepartaian dan pemilu.

Sebagai partai politik yang bertujuan untuk memperjuangkan garis ideologi dan *platform* partai melalui jalur institusi formal negara, PKB harus mengikuti proses pemilu sebagai proses politik legal. Untuk itu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik maka PKB harus memperoleh pengakuan secara legal formal sebagai institusi politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999.²⁵

PKB ialah salah satu pendatang baru diantara partai peserta pemilu 1999. Ditengah perubahan sistem pemilu dan peta kekuatan partai, PKB sebagai partai baru merasa mempunyai peluang untuk menang dalam pemilu 1999. Keyakinan ini muncul karena PKB merupakan cerminan politik NU yang mempunyai basis politik yang kuat. Salah satu yang membuat prediksi optimistis itu adalah pakar politik Indonesia dari Ohio State university Amerika Serikat, Dr. William Liddle yang memprediksi PKB akan memenangkan pemilu 1999²⁶

Rasa optimisme diatas memberi motivasi tersendiri bagi para pengurus PKB untuk mengerahkan energinya dalam upaya memenangkan pemilu. Dengan

²⁵ Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005) h. 35

²⁶ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 261

penuh kepercayaan diri, menghadapi pemilu 1999 DPP PKB membentuk dua institusi atau badan, yaitu Panitia Pemenang Pemilu (Papilu), dan Majelis Penetapan Calon Anggota Legislatif (Mantap).²⁷

Tugas Papilu yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemenang pemilu sesuai dengan kebijakan DPP PKB. Sedangkan tugas Mantap melakukan penjurian, penyeleksian dan penetapan calon anggota Legislatif dari PKB.²⁸

Persiapan dan konsolidasi PKB secara organisasi telah berjalan dengan lancar. Konsolidasi organisasi penting, karena PKB itu institusi baru, tidak seperti partai yang sudah ada.

PKB optimis untuk menggaet suara minimal 30%. Menurut hitungan PKB tidak ada partai mayoritas tunggal, seperti kemenangan Golkar selama Orde Baru. Karena itu, PKB akan berkoalisi dengan partai politik lain yang meraih suara sekitar 20% sampai semuanya bisa 70% yang berarti bisa mencapai mayoritas. Yang pasti, PKB akan berkoalisi dengan kekuatan politik lain untuk menguasai parlemen asal visinya sama, yaitu partai yang bersikap demokrat, tidak rasial, dan mempunyai visi kerakyatan.²⁹

Dalam pelaksanaan program kampanye, salah satu media yang digunakan oleh PKB adalah televisi. Walaupun dengan biaya yang cukup besar, PKB berhasil membuat dua jenis iklan. Pertama adalah berupa visual versi “Saya

²⁷ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 266

²⁸ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 266

²⁹ Matori Abdul Djilil, *Dari NU Untuk Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999) h.153

Mendengar Indonesia Menyanyi”, dengan menampilkan figur Gus Dur untuk menyampaikan himbauan kepada segenap warga NU dan seluruh bangsa Indonesia agar selalu “Membela yang Benar Bersama PKB”.

Sedangkan versi kedua adalah berupa iklan yang berisi pesan singkat “Coblos PKB, Coblos PKB, Coblos Gambar 35” dengan menampilkan figur Matori Abdul Djilil. Pola kampanye seperti itu memang menjadi tren dalam kampanye pemilu 1999 dimana partai besar hampir semua melakukannya.

Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU juga terlibat menjadi juru kampanye PKB. Untuk kepentingan itu Gus Dur bahkan mengambil cuti dalam aktivitasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Struktur sosial NU yang masih kental dengan pola patron klien antara ulama NU dengan warga NU, menjadikan para ulama sebagai jurkam yang cukup efektif.

Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, PKB berusaha mencerminkan makna demokrasi yang sesungguhnya dalam arti para calon harus berangkat dan kesepakatan dari bawah. Misalnya, DPP mengambil kebijakan bahwa setiap calon anggota DPR RI harus diusulkan oleh DPC dan DPW masing-masing. Dengan kebijakan yang demikian, diharapkan para calon legislatif PKB benar-benar berangkat dari bawah dan dikenal oleh rakyat yang diwakilinya, sekalipun ia adalah orang pusat.³⁰

³⁰ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 268

Setelah melalui proses penjaringan dan seleksi oleh Tim Mantap Pusat, sebanyak 525 calon anggota DPR RI yang di daftarkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pemilu tahun 1999 akhirnya dilaksanakan tepat pada tanggal 7 juni 1999. Dari hasil perhitungan suata, ternyata PKB hanya mampu mengumpulkan sebanyak 12,6% (13.336.968) suara. PKB diurutan ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dengan perolehan kursi yang tidak cukup signifikan bagi PKB untuk mengajukan seorang calon Presiden. memang, pada masa kampanye, pada setiap kesempatan dalam pidato dan orasi, selalu ditegaskan bahwa apabila PKB menang maka, PKB akan mengajukan kader terbaik untuk calon presiden.

Realitas hasil pemilu adalah menempatkan PDI-P sebagai pemenang pemilu 1999, maka Megawati sebagai Calon Presiden dari PDI-P yang mempunyai peluang yang kuat untuk menjadi Presiden. Akan tetapi rupanya realitas politik berbicara lain. Kekuatan Islam di parlemen, baik dari kalangan tradisional maupun modernis dan mungkin juga dengan motivasi yang berbeda, mendukung Gus Dur sebagai calon Presiden dari partai PKB. Akhirnya, Gus Dur terpilih menjadi Presiden, Bukan Megawati sebagai calon yang di ajukan oleh PDI-P sebagai partai pemenang pemilu.³¹

Perjalanan politik PKB cukup menggembirakan. Pemilu 1999 yang menandai makin terbukanya sistem politik Indonesia berhasil dilalui PKB dengan

³¹ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 269

cukup baik. PKB berhasil mengantongi 13,3 juta suara, PKB juga keluar sebagai pemenang pertama diantara partai-partai baru yang muncul setelah reformasi. Secara keseluruhan PKB berada di posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar.³²

Kemudian pada Pemilu 2004 di sepakati untuk pemilu dilakukan dengan sistem proposional terbuka sebagaimana usulan pemerintah. Dalam mengikuti Pemilihan Umum 2004, PKB memfokuskan perhatiannya dalam memperbaiki kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ke dalam empat bidang, yakni (1) Keberlanjutan dan pengembangan demokratisasi di Indonesia (2) Pengembangan ekonomi kerakyatan (3) Pengembangan otonomi daerah (4) Perubahan Sistem pendidikan nasional.³³

Namun perjalanan pemilu ini tidak semulus pemilu pada tahun 1999. Disini PKB mengalami penurunan suara menjadi 11,9 % juta suara dan politik di daerah pun semakin mengerucut.³⁴

Dalam pemilu 2004 ini PKB memperoleh suara terbesar ketiga ditingkat nasional, tetapi hanya mendapatkan 52 kursi, kalah dengan Partai Demokrat, PAN dan PPP yang memperoleh suara lebih sedikit.³⁵

PKB tidak cukup handal untuk mengelola potensi yang ada dalam dirinya. Terbukti pada pemilu 2004, suara PKB turun menjadi 11,9 juta suara dan

³² *Bebal Sejarah PKB*, h.21

³³ Hakim Jayli dan Mohammad Tohadi, *PKB Dan Pemilu 2004*, h. 65

³⁴ *Bebal Sejarah PKB*, h.21

³⁵ Andi Muawitah Ramly, *Saya Bekerja Maka PKB Menang*, h.199

persebaran politiknya di daerah makin mengerucut dari 13 provinsi menjadi 10 provinsi saja.³⁶

Sebulan menjelang pemilu legislatif, para ulama dan kader PKB memutuskan pencalonan kembali Gus Dur, sebagai calon Presiden RI. Keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah dan perdebatan selama hampir enam jam di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Sebanyak 28 Kiai yang hadir dalam pertemuan di kediaman KH. Abdullah Abbas, juga menyerahkan wewenang kepada Gus Dur untuk menunjuk penggantinya jika berhalangan atau terganjal persyaratan sebagai capres.

Menindak lanjuti keputusan para Kiai Khos tersebut, Mukernas PKB memutuskan untuk tetap memperjuangkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai calon Presiden dalam pemilihan umum presiden 5 Juli 2004.

Berkaitan dengan dukungan para kiai *khos* padanya, yang diperkuat oleh Mukernas PKB tersebut, Gus Dur mulai mencari pasangan cawapres yang dianggapnya tepat. Pilihan Gus Dur akhirnya jatuh kepada Marwah Daud Ibrahim.

Namun, upaya Gus Dur untuk menjadi presiden tidak berjalan sesuai rencana. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah membuat SK KPU No.26 dan No.31 tahun 2004. Kedua SK tersebut berkaitan dengan petunjuk teknis penilaian syarat sehat jasmani dan rohani calon presiden atau wakil presiden, yang menyebutkan bahwa seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus

³⁶ *Bebal Sejarah PKB*, h. 21

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

KPU tidak meloloskan Gus Dur sebagai Capres dari PKB. Alasan KPU, sebagaimana di duga sebelumnya, Gus Dur mengalami gangguan kesehatan secara fisik, meskipun hasil pemeriksaan inteligensia menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki kemampuan inteligensi yang lebih baik dibandingkan dengan Capres dan Cawapres yang lain.

Pada akhirnya setelah gagal meminang Gus Dur sebagai capres, kemudian PKB memberikan dukungannya kepada Wiranto dan Sholahuddin Wahid, namun kekalahan dalam pilpres putara pertama 2004 memaksa PKB untuk mengkalkulasi ulang dukungannya kepada Megawati- Hasyim Muzadi dari PDI-P dan Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono- M Jusuf Kalla dari Partai Demokrat.

Dari hasil Mukernas III PKB yang diadakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2004 mengambil keputusan untuk bersikap netral dan membebaskan masing-masing warga PKB untuk memilih calon Presiden sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sikap politik PKB yang tidak memihak namun “cenderung memilih SBY- Jusuf Kalla ini” rupanya merupakan kunci kemenangan pasangan dari partai Demokrat, terutama dalam mendulang suara dari daerah-daerah yang menjadi basis PKB.³⁷

³⁷ Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, h. 86

Seperti pada pemilu 2004, pemilu 2009 ini juga pemerintah tetap merancang sistem pemilihan umum dengan sistem proposional terbuka. Sistem ini tidak jauh beda dengan mekanisme dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003³⁸.

Akan tetapi ternyata pada hasil pemilu 2009 kali ini PKB ternyata mendapatkan suara lebih kecil di bandingkan dengan pemilu 2004. Pada pemilu 2009 ini PKB hanya mendapatkan 4,9% suara. Penurunan suara ini terjadi akibat konflik internal yang terjadi pada PKB antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.³⁹

Pemilu Tahun	Perolehan Suara	Presentase	Perolehan Kursi	Peringkat
1999	13.336.968 Suara	12,6%	51 Kursi	Ketiga
2004	11.989.564 Suara	11,9%	52 Kursi	Ketiga
2009	5.146.122 Suara	4,9%	27 Kursi	Ketujuh

Namun pada akhirnya kubu Gus Dur mengalami kekalahan. Kubu Gus Dur mayoritas tidak mengikuti politik PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, juga tidak pula ikut serta dalam pemilu tahun 2009. Sehingga hasil perolehan suara dari pemilu PKB pada tahun 2009 ini menurun drastis. Dimana PKB ini menduduki peringkat ketujuh dari partai politik lainnya. Jadi sebenarnya kekuatan Gus Dur sangat efektif dan masih banyak yang mengikuti jejak politik

³⁸ <http://m.tempo.co/read/news/2007/03/20>

³⁹ Wawancara dengan Ali Masykur Musa 23 Maret 2015 jam 13.00 wib

Gus Dur. Namun, dengan demikian Gus Dur tetap menghormati proses politik dan proses hukum.⁴⁰

Sangat disayangkan sekali pada pemilu 2009 ini, padahal PKB adalah salah satu partai politik yang mempunyai dukungan bagus dari masyarakat. Namun akibat dari konflik internal pada PKB ini dan PKB tidak mampu untuk mengelola konflik tersebut, yang akhirnya membawa kerugian tersendiri pada partainya.



⁴⁰ Wawancara dengan Ali Masykur Musa, 23 Maret 2015, pukul 13.00 wib

BAB IV

PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

A. Pengaruh Gus Dur Dalam Penguatan Ideologi Pancasila

Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa sesungguhnya rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua pihak harus memahami dasar negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. kaum muslimin Indonesia bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia juga memikul kewajiban memenuhi kesepakatan bersama itu.

Kaum muslimin Indonesia (termasuk kaum Nahdliyin) menerima dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip, bahwa kaum muslimin Indonesia ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara, karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam.¹

Penerimaan NU atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh NU secara matang dan mendalam. NU adalah organisasi kemasyarakatan yang pertama

¹ Keputusan Muktamar NU XXVII Situbondo, (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1984) h. 26

menuntaskan penerimaan atas Pancasila. Kendati demikian hal itu bukanlah alasan untuk menuduh bahwa penerimaan itu karena ia bersikap akomodatif dan juga tidak benar bahwa kembalinya NU menjadi organisasi keagamaan atau meninggalkan politik praktis sebagai sikap yang emosional. NU bukan hanya pertama menerima tetapi juga yang paling mudah menerima Pancasila.²

Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Bagi NU Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Jadi kemaslahatan dan kesejahteraan warga NU adalah bagian mutlak dari masalah dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Maka untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, disusunlah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.³

Gus Dur mencoba mengurai persoalan mendasar di dalam perbincangan tentang negara Islam. Artinya sejak di dalam ranah diskursifnya, konsepsi tentang negara Islam sudah bermasalah karena terjebak di dalam aspek legal kenegaraan tanpa mengaitkannya dengan legitimasi politik itu sendiri, yakni rakyat.

² Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989) h. 168

³ Hasil Mukhtamar NU ke 27 Situbondo, *NU Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1986) h. 35

Untuk mewujudkan pemerintahan yang menyejahterakan manusia, Gus Dur tidak membutuhkan pendirian negara Islam. Karena jika sebuah pemerintahan telah mampu menyejahterakan rakyat, bentuk formal pemerintahan itu tidak lagi menjadi penting. Hal ini didasarkan Gus Dur pada pemilahan antara prinsip tujuan dan cara penyampaian atau metode (*al-ghayat wa al-wasail*). Jika suatu tujuan bisa tercapai, bentuk dari cara penyampaiannya menjadi sekunder.⁴

Menurut Gus Dur, Pancasila tidak boleh diidentikkan secara menyeluruh dengan agama, karena fungsi masing-masing berbeda. Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara harus menjadi kerangka kemasyarakatan kita sebagai bangsa. Pancasila juga harus mewadahi aspirasi agama-agama termasuk Islam yang menumpang kedudukannya secara fungsional.⁵

Penolakannya terhadap Negara Islam, tetapi menempatkan etika sosial Islam dalam kerangka kenegaraan modern. Pada titik inilah penulis bertemu pada jantung pemikiran Gus Dur yaitu Pancasila, karena Gus Dur berpikir dalam konteks dirinya sebagai warga negara NKRI maka ia menemukan ideal strategis bagi penerapan etika sosial Islam di dalam negara- bangsa RI. Ideal strategis itu ialah Pancasila, yang diterimanya sebagai landasan konstitusional negara serta asas keorganisasian NU pada Mukhtamar ke- 27 di situbondo tahun 1984.

⁴ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan kemanusiaann*, h. 151

⁵ Efendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h.135

Dengan demikian Gus Dur melangkah lebih lanjut dengan menyatakan bahwa Islam bisa memotivasi kehidupan masyarakat melalui Pancasila yang ditempatkan sebagai pandangan hidup bangsa, tidak hanya ideologi negara.⁶

Menurut Gus Dur negara dan agama adalah dua hal yang berbeda. Pancasila adalah hasil pemikiran manusia, upaya penggalian oleh Bung Karno selama sekian lama yang disempurnakan oleh Panitia Sembilan. Sedangkan Agama Islam adalah wahyu Allah, bukan hasil pemikiran nabi Muhammad SAW. Keduanya dapat sejalan dan saling mengukuhkan, tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya pula tidak saling mengalahkan bahkan saling menunjang, saling melengkapi harus bersama-sama dilaksanakan dan diamankan.

Jadi pendapat bahwa hukum Islam disandarkan kepada Pancasila adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak harus ditafsirkan bahwa hal itu merupakan dominasi Pancasila atas hukum Islam. Gus Dur pun beranggapan bahwa negara Pancasila yang berketuhanan seperti yang kita jalani saat ini adalah suatu bentuk perwujudan hubungan Islam dan negara yang sudah tepat dan proposional, dengan catatan bahwa memang masih ada beberapa eksekusi yang harus diperbaiki.⁷

Walaupun NU menjunjung nilai Tradisionalisme tapi NU punya prinsip *al-muhafadzotu 'ala al-Qadim al-Shalih wal akhdzu bil jadidi aslah* menjaga

⁶ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan kemanusiaan*, h. 170

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999) h. 119

sesuatu yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik dari yang lama itu ini pun yang dianut oleh PKB juga.

Gus Dur adalah ideolognya PKB, yang menetapkan sendi-sendi dasar bagi berdirinya PKB. Jadi ada beberapa yang dihasilkan oleh Tim Lima dan Tim Sembilan misalnya *Mabda' Siyasi*. Dalam NU, *Mabda' Siyasi* bisa disebut dengan *Qonun Asasi* yang di tulis oleh Hadratus Syeikh. Disitulah dasar-dasar bagi organisasi maupun ideologi maupun program bagi PKB itu ditetapkan, dasar-dasarnya ada didalamnya. Ini dua hal yang berkaitan dengan Pancasila yang terkandung dalam *Mabda' Siyasi*:

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermatabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
2. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

Itulah sebagian hasil pemikiran-pemikiran Gus Dur yang tertuang didalam *Mabda' Siyasi* tentang Pancasila, kemudian hasil yang lain adalah hubungan NU dengan partai politik disitu dinyatakan sifat-sifat hubungan ada hubungan ideologi, kemudian AD/RT, yang ngotot bahwa dasar partai ini pancasila ini adalah Gus Dur dan sebagian menginginkan dasar ideologi PKB adalah Islam. kemudian di ADRT ini diletakkannya ulama sebagai pemimpin tertinggi, kemudian ketika menjabarkan 9 bintang sebagai 9 nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PKB itu Gus Dur ada kemerdekaan, ada kesetaraan, kesamaan hak dan lainnya.⁸

Dengan didirikannya partai PKB ini pertama, Gus Dur dan warga NU menginginkan dengan dibentuknya PKB ini ikut menjaga keutuhan NKRI, kedua tetap terjaganya ideologi negara Pancasila sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa bernegara, maka dari itu Pancasila dijadikan sebagai dasar dari PKB, karena Pancasila yang hendak diperjuangkan terus di PKB, ketiga keinginan terus untuk menjaga prulalitas yang ada dimasyarakat kita, karena dalam

⁸ Wawancara dengan Arifin Junaidi, tanggal 22 April 2015, pukul 15.30 wib

pancasila itu sendiri ada slogan Bhineka Tunggal Ika ini yang akan terus di bentengi oleh partai ini. keempat untuk tetap menjadikan konstitusi undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia tidak diubah dengan yang lain.⁹

B. Pengaruh Gus Dur Dalam Menata Hubungan Antara Agama Dan Politik PKB

Pemikiran kenegaraan Gus Dur dapat dikategorikan sebagai pemikiran sekularistik, yaitu pemisahan antara wilayah agama dan negara. Sejalan dengan pemikiran tokoh seperti Ali Abd A-Raziq.¹⁰ Hal ini terjadi karena Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik meskipun tidak harus diwadahi dalam negara Islam.¹¹ Gus Dur adalah penganut paradigma yang menetapkan bahwa agama dan negara tidak ada hubungan secara struktural tetapi agama menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Dalam wacana politik Islam sendiri paling tidak, terdapat tiga paradigma tentang pola hubungan antara Islam dan Negara, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik dan paradigma sekularistik. Katiga paradigma ini dapat dipakai untuk mengukur karakteristik corak pemikiran tentang politik Islam,

⁹ Wawancara dengan Arifin Junaidi, tanggal 22 April 2015, pukul 15.30 wib

¹⁰ *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan*, h. 121

¹¹ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan kemanusiaan*, h. 170

¹² Wawancara dengan Ali Masykur Musa, tanggal 29 April 2015 , pukul 10.00 WIB

termasuk dalam pandangan NU tentang hubungan Islam dan negara khususnya dalam konteks ke Indonesiaan.

NU menganut tentang hubungan simbiotik antara Islam dan negara, yang bisa dilihat dalam dasar-dasar yang dijadikan landasan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.¹³

Dapat dikatakan bahwa PKB lahir sebagai eksperimen politik NU pasca khittah. Pola hubungan PKB yaitu sebagai partai politik dan warga NU sebagai konstituennya, terjadi hubungan timbal balik secara politik dimana dukungan warga NU harus direspon dengan memperjuangkan kepentingannya.

Dapat dikatakan PKB merupakan alat politik NU. Kelahiran PKB juga harus dipahami dalam kerangka paradigma berpikir NU tentang visi dan realitas kebangsaan.¹⁴

Gus Dur menginginkan PKB dalam hubungan antara agama dan politik yaitu keduanya bisa berjalan seiring. karena PKB mementingkan kepentingan nasional dan juga mampu untuk menyelaraskan antara hukum-hukum nasional dengan *fiqh*, yang mana di Indonesia ini adalah bukan sebuah negara agama.

Ada istilah *the power tends to corrupt* jadi kekuasaan cenderung untuk merusak. Dan ada juga yang menambahkan kekuasaan atau kekuasaan tanpa agama itu akan rusak, ada juga yang memaparkan kekuasaan tanpa akhlak itu akan rusak, jadi agama dan politik harus berjalan beriringan, dan itupun yang

¹³ Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 125

¹⁴ Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, h. 307

diterapkan dalam PKB. Lalu langkah-langkah politik lebih menempatkan ulama pada posisi tertinggi, maka langkah-langkah politik harus terus di arahkan oleh nilai-nilai agama.¹⁵

Perjuangan-perjuangan nilai keagamaan yang dilakukan oleh PKB tidak melalui strukturalis ideologis, yang mana strukturalis itu menamakan Indonesia yang mendasarkan pada agama menjadi ideologi negara. Tetapi perjuangan PKB dalam konteks menjadikan Islam sebagai inspirasi perjuangan keagamaan adalah melalui sistem yang dinamakan oleh Gus Dur yaitu eklektik. eklektik adalah agama bisa menginsert/ masuk didalam sistem nilai kebangsaan. Karena itulah NU dan PKB bisa memperjuangkan seperti perbankan syariah. Perbankan syariah yang esensinya Islam bisa masuk sistem ekonomi negara. Jadi tidak melalui strukturalis kenegaraan dan ideologi kenegaraan tapi melalui sistem nilai yang masuk didalam negara.¹⁶

Begitu pula dalam konteks PKB Gus Dur juga selalu mengedepankan Islam yang toleran, inklusif dan menjunjung tinggi pada aspek humanisme, hingga dengan demikian gerakan Gus Dur didalam PKB secara nasional tidak meletakkan Islam struktural tetapi mendekati Islam substantial dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Arifin Junaidi, tanggal 22 April 2015, pukul 15.30 wib

¹⁶ Wawancara dengan Ali Masykur Musa, tanggal 23 April 2015, pukul 13.00 wib

¹⁷ Wawancara dengan Ali Masykur Musa, tanggal 29 April 2015, pukul 10.00 wib

C. Pengaruh Gus Dur Dalam Orientasi dan Praktik Politik Dalam PKB

Sejak berdirinya PKB, partai ini menempatkan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah. PKB tidak pernah menjadi partai oposisi juga tidak menjadi partai pemerintah. Sikap politik seperti itu dipilih karena PKB benar-benar ingin menjadi saluran aspirasi masyarakat. Sebab, bagi PKB politik adalah sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum, sebagaimana ditegaskan ibn 'Aqil: *al-siyasah ma kana fi'lan yukun ma'a al-nas aqrab ila al-ashlah wa ab'ad 'an al-fasad wa in lam yadha'hu al-rasul wa lam yanzil bih wahy* (politik adalah tindakan untuk membuat rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, kendatipun tidak ada panduan bakunya dari rasul atau kitab suci).

Rumusan itu berangkat dari pemikiran teologis bahwa syariat, dan bahkan agama itu sendiri, diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan seluruh umat manusia (*al-din al-nashihah*), dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dibutuhkan suatu kebijakan khusus, meski tidak ada ketentuan bakunya dalam nash. Itulah yang dalam fiqih disebut sebagai *al-siyasah al-syar'iyyah*. Karena itu, bagi PKB, politik adalah bagian dari syariat (*al-siyasah juz'un min ajza' al-syari'ah*).¹⁸

Orientasi PKB sama dengan ideologi PKB yang dikembangkan, jadi inilah yang membedakan PKB dengan PPP, PKB dengan PKS mereka jelas-jelas mengatakan sebagai partai Islam tetapi kalau PKB adalah partai bangsa/kebangsaan, yang juga memperjuangkan keagamaan. Karena memang

¹⁸A. Effendy Choirie, *PKB Dari NU Untuk Indonesia*, h. 41

Indonesia itu bukan negara agama tetapi negara Pancasila yang esensi dari ideologi Pancasila itu sejalan dengan Islam itu sendiri. Dengan demikian, implikasi dari sikap PKB seperti itu artinya negara Pancasila kehadirannya juga bisa diterima oleh non muslim.¹⁹

PKB harus mampu memainkan dirinya dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan cara melakukan penataan organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal, harus menempatkan kedudukan, peran, dan fungsinya secara tepat, melakukan reposisi dan reorientasi secara benar. Secara eksternal, harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah kemasyarakatan. PKB tidak boleh hanya menjadi “menara gading” yang sekedar memproduksi kader-kadernya untuk menempati pos-pos strategis kekuasaan, tetapi harus menjadi “pejuang partai” yang mempunyai komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan, karena dengan cara seperti itu, PKB menjadi milik dan dicintai oleh orang banyak.

Orientasi PKB bukan untuk memproteksi kebijakan pemerintah/penguasa. Karena misi PKB adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara konsisten dan penuh kesungguhan melakukan pengawasan secara kritis terhadap kebijakan pemerintah dan membangun etika moral politik dengan penegakan hukum, keadilan dan demokrasi.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Ali Masykur Musa, tanggal 23 April 2015 , pukul 13.00 wib

²⁰ Hasil-hasil Keputusan Mukernas dan Munas Alim ‘Ulama PKB, Muspim PKB, Rekornas Dewan Syura PKB, *Rapatkan Barisan*, (Jakarta: DPP PKB, 2002) h. 71

Untuk menyambung mata rantai perjuangan PKB di Lembaga Perwakilan, PKB membentuk perangkat partai yang disebut dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang disingkat FKB. Anggaran umah Tangga PKB (ART PKB) Pasal 34 ayat (2) menyebutkan, FKb merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. FKB di MPR/DPR RI di bentuk oleh DPP PKB, Di DPRD I dibentuk DPW dan di DPRD II dibentuk DPC.

FKB berusaha menyalurkan anggaran negara untuk menghidupkan ekonomi pesantren melalui program bantuan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Keagamaan (LM3). Dibidang pengawasan, FKB telah menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah diantaranya, mendorong interpelasi terhadap kebijakan impor beras, kenaikan harga BBM, interpelasi nuklir Iran, interpelasi lumpur Lapindo dan terakhir interpelasi BLBI.

Dibidang representasi, FKB DPR secara proaktif mengadvokasi orban lumpur lapindo, korban sengketa Alastlogo dan memberikan bantuan untuk korban banjir. Sedangkan dibidang publikasi, FKB terus berjuang memperbaiki media komunikasi dan publikasi, baik kedalam maupun keluar. Kedalam, FKB akan mengefektifkan penggunaan *website* untuk menyosialisasikan apa-apa yang telah dan akan dilakukan FKB. Kemudian keluar, FKB akan mengintensifkan

hubungan dengan mass media, baik cetak maupun elektronik. Mereka adalah *Public Relation* yang ikut mempengaruhi pembentukan citra publik FKB.²¹

Ketika Gus dur secara resmi baik politik maupun hukum menjadi Ketua Dewan Syuro PKB, maka hampir seluruh gerakan PKB mulai dari perencanaan dan memperkokoh ideologi PKB sampai pelaksanaan mempengaruhi konstituen. Gus Dur mempunyai pengaruh yang sangat kuat, tetapi setelah mengalami perpecahan dimana Ketua Umum PKB dibawah pimpinan Muhaimin Iskandar dengan Ketua Dewan Syuro Kiyai Azis Mansyur maka posisi dan pengaruh Gus Dur hanya sebatas pada orientasi ideologi belaka, bukan dalam praktek politik praktis, karena memang pengendali PKB tidak lagi Gus Dur sejak tahun 2009. Dengan kesimpulan, status Gus Dur menjadi atau tidak menjadi Ketua Dewan Syuro tetap berpengaruh dilingkungan PKB. Akhirnya PKB yang sekarang masih membutuhkan pengaruh Gus Dur, Karena konstituen masih banyak yang taat pada prinsip-prinsip perjuangan Gus Dur.²²

²¹ Effendy Choirie, *PKB Dari NU Untuk Indonesia*, h. 83

²² Wawancara dengan Ali Masykur musa, tanggal 29 April 2015, pukul 10.00 wib

D. Faktor-faktor Pengaruh Pemikiran Gus Dur Pada Tubuh PKB

Silsilah keluarga Gus Dur memang tidak main-main, karena ia termasuk keturunan para tokoh pembesar, Kiai sekaligus para penyebar Islam di tanah Jawa.²³ Berikut inilah faktor-faktor pengaruh Gus Dur pada Tubuh PKB:

1. Gus Dur adalah cucu dari pendiri NU. Kakek Gus Dur, KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi NU, sedangkan ayahnya juga seorang aktivis NU, maka sudah dipastikan arah perjalanan keorganisasian Gus Dur mau tidak mau memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam organisasi bentukan sang kakek tersebut.²⁴ Sehingga ketika Ia terjun pada PKB Gus Dur di hormati oleh orang-orang PKB, karena PKB lahir dari rahim NU.
2. Gus Dur adalah salah satu deklaratör PKB. Gus Dur sendiri merupakan sosok yang tidak mungkin dinegasikan sebagai konseptor awal pendirian partai kebanggaan warga *Nahdliyin* tersebut. Gus Dur selaku pengemban amanat warga *jami'iyyah* yang rata-rata sudah tidak sabar lagi menanti munculnya partai baru, nampaknya tidak mampu lama-lama menahan desakan arus bawah. Gus dur waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah NU. Maka, peranan Gus Dur yaitu sebagai bidan atau fasilitator yang ditugasi oleh PBNU.²⁵ Nah, karena Gus Dur ikon tunggal pada partai ini. Gus Dur mudah di taati oleh anggota PKB.

²³ Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014) h. 13

²⁴ Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?*, h. 19

²⁵ Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB*, h. 22

3. Gus Dur pernah terpilih sebagai Presiden RI ke-4. Gus Dur berani melawan arus dan membersihkan sisa-sisa peninggalan Orde Baru.²⁶ Gus Dur terpilih sebagai Presiden dari kalangan NU, yang memudahkan ia diterima dengan baik oleh anggota PKB. Ini juga menjadi sejarah yang baik bagi PKB, karena pada pemilu awal PKB didirikan, PKB mampu mendapatkan peringkat ketiga dan kandidatnya terpilih sebagai Presiden RI.
4. Pemikiran-pemikiran Gus Dur banyak dituangkan pada PKB. Selain karena Gus Dur cucu dari pendiri NU, Gus Dur juga banyak menuangkan pemikirannya dalam pembentukan prinsip dasar PKB yaitu, *Mabda' Siyasi*, AD/ART, Naskah Deklarasi. Sehingga Gus Dur mempunyai pengaruh yang baik bagi PKB.

²⁶ Agus N. Cahyo, *Salah Apakah Gus Dur?*, h.57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian penelitian yang berjudul Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan pengaruhnya terhadap politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009 dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Gus Dur dalam penguatan ideologi Pancasila pada PKB

Pancasila adalah landasan yang paling tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila mampu mewadahi aspirasi bagi setiap agama salah satunya Islam. Menurut Gus Dur agama dan negara itu dua hal yang sangat berbeda. Namun keduanya saling berkaitan, dapat mengukuhkan satu sama lain, tidak bertentangan dan juga harus diperjuangkan serta diamalkan. Jadi Pancasila suatu bentuk perwujudan hubungan Islam dan negara yang sudah paling sesuai dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi kederadaannya.

Kemudian ideologi Pancasila ini Gus Dur terapkan dalam PKB, karena Gus Dur menginginkan PKB ini menjadi salah satu partai yang bisa ikut menjaga NKRI dan dengan dianutnya ideologi Pancasila pada PKB, PKB ini dapat diterima bukan hanya dikalangan warga NU tetapi bisa juga dikalangan non muslim, menjaga pluralitas yang ada di Indonesia dan tetap menjadikan

konstitusi undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia tidak diubah dengan yang lain.

Pengaruh Gus Dur dalam penguatan ideologi Pancasila pada PKB sangatlah besar. Karena dari dari pembentukan ideologi Pancasila ini terbentuklah *Mabda' Siyasi*, AD/RT, dan Naskah Deklarasi. Yang mana itu semua dijadikan sebagai pedoman PKB yang masih dijalankan sampai sekarang.

2. Pengaruh Gus Dur dalam menata hubungan agama dan politik yang dianut dalam PKB

Gus Dur adalah penganut yang menyatakan bahwa agama dan negara tidak ada hubungan secara struktural akan tetapi ia beranggapan bahwa Islam adalah sumber nilai pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

PKB adalah partai politik yang lahir dari rahim NU, yang mana segala sesuatu baik ideolog maupun prinsipnya masih berkaitan dengan NU. termasuk dalam pandangan tentang hubungan Islam dan negara dalam konteks ke Indonesiaan.

Jadi Gus dur dalam menata hubungan agama dan politik yang ada dalam PKB, yaitu ia selalu mengedepankan Islam yang toleran, inklusif yang mana kesadaran akan kelompok atau agama lain harus diterima untuk hidup berdampingan secara damai dan menyadari pluralisme.

Gus Dur juga mampu membangun PKB dengan menyelaraskan antara *fiqh* dengan hukum nasional dan mementingkan kepentingan nasional demi

kesejahteraan masyarakat. Karena Indonesia bukanlah negara Islam melainkan negara kesatuan.

3. Pengaruh Gus Dur dalam orientasi dan praktik politik PKB

Gus Dur dalam orientasi dan praktik politik PKB sangatlah penting. Karena Gus Dur dipandang sebagai sosok intelektual muslim yang mampu berpikir moderat untuk kemajuan bangsa. Orientasi PKB yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang dengan sungguh-sungguh melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah dan membangun etika moral politik dengan penegakan hukum, keadilan dan demokrasi.

Gus Dur mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam orientasi dan praktek politik pada PKB, karena baik mendirikan PKB, membuat *Mabda' siyasi*, AD/ART, menentukan DPP PKB, atau menentukan caleg itu Gus Dur adalah salah satu tokoh yang berperan didalamnya. Dan praktik PKB dalam parlemenpun sangat matang. Karena PKB mampu membentuk FKB yang mana berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam kelembagaan MPR/DPR.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan pembahasan Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Era Reformasi 1998-2009 ini, Penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk partai politik dalam pembuatan ideologi bagi partai, agar tidak bertentangan dengan NKRI, agar selalu menciptakan kesatuan dan memperjuangkan nilai-nilai di Indonesia. Pancasila adalah pilihan yang baik untuk ideologi partai karena tidak bertentangan baik Agama maupun Negara.
2. Dalam menata hubungan agama dalam politik sebaiknya politik itu bisa sejalan dengan agama, karena negara tanpa agama itu akan hancur, dan agama tanpa negara itu akan sia-sia.
3. Mengorientasikan partai politik sebaiknya dengan tujuan untuk kelancaran apa yang dicita-citakan oleh partai, bukan untuk kekuasaan dan kepentingan partai itu sendiri.
4. Untuk pengendalian konflik internal pada partai. Sebesar apapun konfliknya sebaiknya jangan ada perpecahan didalamnya, karena itu akan membuat kerugian tersendiri pada partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdillah Masykuri, "Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme", Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 1999)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (palu: sinar grafika, 2009)

Arif Syaiful, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)

Bahar Ahmad, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Bina Utama Perkasatama Publishing, 1999)

Barton Greg, *Biografi Gus Dur The authorized Biography of Abdurrahman Wahid*", (Yogyakarta : LKIS, 2002)

Bebal Sejarah PKb Dalam Pusaran Konflik dan Konflik (Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Bangsa, 2008)

Cahyo Agus N., *Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014)

Choirie A. Effendi, *PKB Dari NU untuk Indonesia*, (Jakarta Selatan: Levira Foundation, 2008)

Choirie A. Effendy, *PKB Politik Jalan Tengah NU Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan pasca Kembali Ke Khittah 1926*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002)

Djalil Matori Abdul, *Dari NU Untuk Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999)

Dokumen Muktamar I PKB, *Membangun Persaudaraan Sejati Antar Manusia Sebagai Esensi Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, 2000)

DPW PKB Jawa Tengah, *Partai Untuk Rakyat*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2003)

- Esposito John L., John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Mendayung di Pusaran*, (Jakarta: PT Inti Bintang Cemerlang, 2004)
- Hadi Syamsul, KH. Abdurrahman Wahid *Guru Bangsa, Bapak Pluralisme*, (Jombang: Zahra Book)
- Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo, *NU Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1986)
- Ismail Faisal, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999)
- Jayli Hakim dan Mohammad Tohadi, *PKB Dan Pemilu 2004*, (Jakarta Selatan: Lembaga Pemenang Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2003)
- Kelompok Kerja LPP DPP PKB, *Orientasi Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta, LPP DPP PKB, 2002)
- Keputusan Muktamar NU XXVII Situbondo, (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1984)
- Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005)
- MD Mahfud, *Gus Dur Islam, Politik dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010)
- Mubarok A. dan Fathurrahman Karyadi, “Biografi Singkat”, A.M.Y. Spe (Editor), *Gus Dur di Mata Keluarga dan Sahabat*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010)
- Mudatsir Arif dan Mandan Miftahuddin, *Jejak Langkah Guru Bangsa Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Pustaka Indonesia satu, 2010)
- Musa Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Nahrawi Imam, *Moralitas Politik PKB (Aktualisasi PKB Sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern)*, (Malang: Averroes Press, 2005)
- Ng Al-Zastrauw, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

- Purwanto Wawan H., *The Power Of Gus Dur*, (CMB Press: 2010)
- Ramly Andi Muawiyah, *Saya Bekerja maka PKB menang*, (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa, 2008)
- Rifai Muhammad, *Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi House Of Book, cet 1, 2010)
- Santoso Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Jogjakarta, 2004)
- Selvila Consuelo G, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press, 2006)
- Sitompul Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)
- Suaedy Ahmad dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Wahid Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transfirmasi Kebudayaan*, (Jakarta: The wahid Institute, 2007)
- Wahid Abdurrahman, *Islam, Negara dan Demokrasi Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Wahid Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- Wahid Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999)
- Wahid Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 1999)
- Yahya Ali, *Gus Dur di Mata Adik-Adiknya*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010)
- Zada Khamami, A. Fawaid Syadzali, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas media Nusantara, 2010)
- Zakki Muhammad, *Gus Dur presiden Republik Akhirat*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2010)

Internet

<http://m.tempco.co/read/news/2007/03/20>

<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/03164441/jalan.panjang.konflik.pkb>

